

Dr. Mistarija, M.A



PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

BERBASIS KEARIFAN LOKAL

MODEL, PENDEKATAN, DAN STRATEGI

Pengembangan Masyarakat Islam
----- *berbasis* -----
KEARIFAN LOKAL
Model, Pendekatan, Dan Strategi

Dr. Mistarija, M.A



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Model, Pendekatan, Dan Strategi

Copyright @2026 by Dr. Mistarija, M.A

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis

Dr. Mistarija, M.A

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Lailatul Nur Ula

Editor Naskah

Shovia Lintina, M.Psi

ISBN

978-634-278-468-6

15,5 x 23 cm, vi + 222 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2026

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Penjualan Buku

Website: <https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Shopee: @penerbitKBM

Youtube

@PenerbitKBMOfficial

Tiktok

@penerbitkbm

Email

naskah@penerbitkbm.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Kearifan Lokal: Model, Pendekatan, dan Strategi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadaban, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus refleksi sosial terhadap dinamika pembangunan masyarakat yang sering kali belum sepenuhnya berpijak pada nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, masyarakat membutuhkan model pengembangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga mampu menjaga identitas sosial, nilai budaya, dan ketahanan moral masyarakat.

Pengembangan masyarakat Islam dalam buku ini dipahami sebagai proses pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya partisipasi, penguatan kelembagaan lokal, solidaritas sosial, serta integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya masyarakat. Kearifan lokal diposisikan bukan sekadar warisan budaya, tetapi sebagai modal sosial yang hidup dan terus berkembang dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan konsep dasar pengembangan masyarakat Islam, model dan pendekatan pemberdayaan, struktur sosial masyarakat lokal, peran kelembagaan adat dan keagamaan, hingga strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Berbagai pembahasan tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan memahami karakter sosial, budaya, dan nilai kehidupan masyarakat setempat.

Buku ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, kepedulian sosial, kepemimpinan adat, dan semangat kolektivitas merupakan kekuatan penting dalam proses pembangunan masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam, maka akan lahir model pengembangan masyarakat yang tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas moral, spiritual, dan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam serta menjadi bahan rujukan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi sosial, tokoh masyarakat, dan siapa saja yang memiliki perhatian terhadap pembangunan masyarakat berbasis budaya dan nilai-nilai keislaman.

Secara khusus, buku ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap perjalanan kehidupan. Kepada almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta nilai kehidupan yang telah diwariskan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada istri tercinta, Shovia Lintina, M.Psi., penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya atas doa, kesabaran, dukungan, dan ketulusan yang tidak pernah putus dalam mendampingi setiap proses kehidupan dan penulisan karya ini. Kepada anak-anak tercinta, terima kasih atas semangat, keceriaan, serta penguat hati dalam setiap langkah perjuangan yang dijalani.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun masyarakat yang berdaya, berbudaya, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Ciputat,

Dr. Mistarija, M.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM: LANDASAN KONSEPTUAL DAN PARADIGMA.....	1
A. Landasan Konseptual Pengembangan Masyarakat	1
B. Partisipasi dan Komunikasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat	15
C. Pengembangan Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah	21
D. Landasan Konseptual Pengembangan Masyarakat Islam.....	25
KEARIFAN LOKAL DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	45
A. Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat.....	45
B. Struktur Sosial dan Kepemimpinan Lokal.....	50
C. Kelembagaan Lokal dalam Pengembangan Masyarakat	65
MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT ISLAM	83
A. Model Pengembangan Masyarakat Konvensional	83
B. Model Pengembangan Masyarakat Islam	86
C. Analisis Komparatif Model Pengembangan Masyarakat.....	91
D. Argumentasi Pemilihan Model Locality Development.....	97
E. Sintesis Model Pengembangan Masyarakat dan Model Pengembangan Masyarakat Islam	98
STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	103
A. Penguatan Partisipasi Masyarakat	103
B. Penguatan Kelembagaan Sosial	105
C. Pengembangan Kapasitas Masyarakat	107
D. Penguatan Komunikasi Sosial	109
E. Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal	110

DINAMIKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL	115
A. Dinamika Pengembangan Masyarakat Lokal	115
B. Infrastruktur Sosial dan Pembangunan Masyarakat	130
C. Peran Kearifan Lokal dalam Pengembangan Masyarakat ...	141
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	149
A. Tantangan Pengembangan Masyarakat	149
B. Tantangan Sosial dan Globalisasi.....	154
C. Strategi Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan	158
REKONSTRUKSI MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....	165
A. Rekonstruksi Model Pengembangan Masyarakat Islam.....	165
B. Prospek Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	177
GLOSARIUM.....	187
INDEKS.....	219
BIODATA PENULIS.....	221



PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM: LANDASAN KONSEPTUAL DAN PARADIGMA

A. Landasan Konseptual Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan konsep yang memiliki spektrum makna luas, baik sebagai proses sosial, pendekatan praksis, maupun disiplin akademik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai proses ketika anggota masyarakat bersatu untuk bertindak bersama dalam merumuskan dan menyelesaikan persoalan kolektif. Definisi ini menegaskan bahwa inti pengembangan masyarakat terletak pada

tindakan kolektif dan kapasitas masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri.

Sejalan dengan itu, International Association for Community Development (IACD) memandang pengembangan masyarakat sebagai praktik profesional sekaligus disiplin akademik. IACD kemudian merumuskan Standar Internasional Praktik Pengembangan Masyarakat yang menekankan nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, persatuan, dan keberlanjutan lingkungan (Ross et al., 2018). Perspektif ini memperluas pengembangan masyarakat dari sekadar aktivitas sosial menjadi kerangka normatif dan profesional.

Secara konseptual, pengembangan masyarakat juga dipahami sebagai proses pemberdayaan. Jim Ife dan Edi Suharto menekankan bahwa pengembangan masyarakat berorientasi pada penguatan kapasitas, partisipasi, dan keadilan sosial (Suharto, 2017; Suharto, 2009). Proses ini mencakup upaya memberdayakan, membina, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara partisipatif. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif.

Lebih lanjut, Susan Kenny menegaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses yang membantu masyarakat mengambil tanggung jawab kolektif atas pembangunan mereka sendiri (Kenny, 2007). Sementara itu, Rhonda Phillips dan Robert Pittman melihat pengembangan masyarakat sebagai kombinasi antara proses dan hasil dari kerja sama kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup (Phillips & Pittman, 2014). Dengan demikian, pengembangan masyarakat memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai proses partisipatif dan sebagai outcome berupa peningkatan kesejahteraan.

Dari perspektif praksis, pengembangan masyarakat dijalankan oleh berbagai aktor lintas sektor. Marilyn Taylor dan Alison Gilchrist menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan pekerja sosial, pendidik, tenaga kesehatan, perencana kota, hingga pelaku pengembangan ekonomi lokal (Gilchrist & Taylor, 2022). Praktik tersebut berlangsung pada berbagai level, mulai dari intervensi berbasis komunitas hingga perencanaan strategis. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan masyarakat bersifat multidisipliner dan kontekstual.

Secara historis, pengembangan masyarakat berakar dari praktik kolonial Inggris yang kemudian berkembang menjadi pendekatan pembangunan partisipatif. Istilah ini mulai digunakan secara formal pada tahun 1948 untuk menggantikan konsep pendidikan massa (mass education)(Adi, 2012). Di Amerika Serikat, akar pengembangan masyarakat berkembang melalui program penyuluhan pedesaan (rural extension) yang berorientasi pada pendidikan masyarakat (Adi, 2012). Jejak historis ini menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat selalu terkait dengan upaya transformasi sosial berbasis pendidikan dan partisipasi.

Dalam praktiknya, pengembangan masyarakat berfokus pada kelompok rentan yang mengalami keterbatasan akses akibat kemiskinan, diskriminasi, atau ketimpangan struktural (Soharto, 2017). Malcolm Payne mengidentifikasi dua bentuk utama implementasi, yaitu program pembangunan yang meningkatkan kapasitas masyarakat dan aksi sosial yang mendorong pemenuhan kebutuhan kelompok lemah (Payne, 1979). Fokus ini memperjelas orientasi normatif pengembangan masyarakat pada keadilan sosial.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat dirumuskan sebagai suatu proses terencana dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kapasitas, kerja sama kolektif, dan penguasaan terhadap sumber daya serta proses sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Definisi ini menegaskan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya berorientasi pada perubahan kondisi, tetapi juga pada transformasi struktur dan relasi sosial secara berkelanjutan.

2. Urgensi Pengembangan Masyarakat

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat menekankan partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktik pembangunan global, pendekatan tersebut tidak selalu menjadi arus utama. Pembangunan justru lebih banyak didominasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai objek. Kesenjangan antara konsep dan praktik inilah yang melahirkan urgensi pengembangan masyarakat sebagai pendekatan alternatif.

Urgensi pengembangan masyarakat terletak pada kemampuannya menjawab persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara individual. Pendekatan ini mendorong demokrasi partisipatif, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Ross et al., 2018). Pengembangan masyarakat juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas individu dan kolektif agar mampu mengontrol proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Urgensi pengembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional. Pembangunan selama ini sering dipandang sebagai solusi utama atas berbagai persoalan sosial, khususnya di negara berkembang. Pendekatan awal pembangunan sangat dipengaruhi oleh teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom ortodoks. Teori ini menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, yang diukur melalui Gross National Product (GNP) (Clark, 1991). Asumsi dasarnya sederhana, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan standar hidup masyarakat.

Namun, asumsi tersebut tidak sepenuhnya terbukti dalam praktik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus di negara berkembang, peningkatan GNP tidak memberikan dampak signifikan bagi kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan tetap terjadi, bahkan cenderung melebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan bersifat reduksionis dan mengabaikan dimensi sosial.

Keterbatasan tersebut mendorong munculnya pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada manusia, salah satunya adalah pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat. Pengembangan masyarakat menekankan partisipasi aktif, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Dalam kerangka ini, urgensi pengembangan masyarakat terletak pada kemampuannya menjawab persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan top-down.

Pengembangan masyarakat mendorong demokrasi partisipatif, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ross et al., 2018). Pendekatan ini juga berfokus pada kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam arus pembangunan, seperti masyarakat miskin, kelompok marginal, dan komunitas yang mengalami diskriminasi (Soharto, 2017).

Lebih jauh, pengembangan masyarakat tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa kesejahteraan, tetapi juga pada proses yang memberdayakan. Masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi, dan mengontrol proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pengembangan masyarakat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai suatu perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, mensinergikan strategi komprehensif pemerintah pihak-pihak terkait *related parties* dan partisipasi warga, membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga dan mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan perhatian dan gagasan warga komunitas (Ife, 1995).

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*), mengubah dan terlibat dalam konflik. pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat, membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan, kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Zubaedi, 2013).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1957 merumuskan sejumlah prinsip dasar pengembangan masyarakat yang hingga kini masih relevan digunakan dalam berbagai praktik pembangunan di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pengembangan masyarakat harus dimulai dari kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Program pembangunan tidak dapat dipaksakan dari luar tanpa memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Karena itu, setiap kegiatan pembangunan seharusnya lahir sebagai jawaban atas persoalan dasar yang dihadapi masyarakat, sehingga pembangunan benar-benar memiliki makna dan manfaat dalam kehidupan mereka (Zubaedi, 2013).

Pengembangan masyarakat juga tidak dapat dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Kemajuan sosial membutuhkan keterpaduan berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan yang hanya berfokus pada satu bidang tanpa memperhatikan bidang lain sering kali menghasilkan ketimpangan dan tidak mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengembangan masyarakat perlu disusun dalam bentuk program yang terintegrasi dan memiliki tujuan yang saling mendukung satu sama lain.

Selain pembangunan material, perubahan sikap dan pola pikir masyarakat juga menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pengembangan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik atau meningkatnya fasilitas umum, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab sosial, dan kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupannya secara mandiri. Pembangunan yang hanya menghasilkan kemajuan fisik tanpa perubahan sosial sering kali tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi inti utama pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Keterlibatan tersebut akan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan. Di samping itu, revitalisasi

kelembagaan lokal dan pemerintahan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang demokratis dan partisipatif.

PBB juga menekankan pentingnya identifikasi dan penguatan kepemimpinan lokal dalam pengembangan masyarakat. Pemimpin lokal memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan proses pembangunan. Karena itu, pengembangan kapasitas pemimpin lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan pengalaman sosial menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang mandiri. Kepemimpinan lokal yang kuat akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.

Partisipasi perempuan dan generasi muda juga dipandang sebagai unsur penting dalam pengembangan masyarakat. Keterlibatan kedua kelompok tersebut akan memperluas basis sosial pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Perempuan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan keluarga dan pendidikan sosial masyarakat, sedangkan generasi muda menjadi kekuatan utama dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Karena itu, pembangunan masyarakat tidak boleh hanya didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi harus membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh unsur masyarakat.

Di sisi lain, program swadaya masyarakat tetap memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berjalan secara efektif. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, pendampingan, bantuan teknis, penguatan kelembagaan, maupun penyediaan fasilitas pendukung pembangunan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam skala yang lebih luas, pengembangan masyarakat membutuhkan kebijakan nasional yang konsisten dan sistem pendukung yang kuat. Hal ini mencakup penguatan administrasi pembangunan, pelatihan sumber daya manusia, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, serta pengembangan penelitian dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat tidak

hanya menjadi aktivitas sosial sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

PBB juga menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi nonpemerintah dalam pengembangan masyarakat. Organisasi sosial, lembaga keagamaan, komunitas lokal, dan berbagai lembaga masyarakat sipil memiliki potensi besar dalam memperkuat pembangunan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut akan memperluas jaringan sosial pembangunan dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial secara kolektif.

Pada akhirnya, kemajuan masyarakat di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di tingkat nasional. Pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik harus berjalan secara paralel agar masyarakat lokal memperoleh dukungan yang memadai untuk berkembang. Ketika pembangunan nasional mampu terhubung dengan kebutuhan masyarakat lokal, maka pembangunan akan lebih mudah menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat pada hakikatnya bukan hanya membangun infrastruktur atau ekonomi, tetapi membangun manusia, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.

Prinsip-prinsip tersebut apabila ditelaah satu persatu akan memberikan keyakinan mendasar bagi mereka yang bekerja secara profesional dalam program-program pengembangan masyarakat.

Mereka "belajar" bahwa suatu program pengembangan masyarakat tak dapat dipaksakan penerapannya dan apabila ingin "berakar" harus bersifat lokalitas. Akan tetapi di banyak negara-negara berkembang perlu waktu yang relatif lama melakukan pengembangan masyarakat dengan peranan pemerintah yang semakin berkurang.

Lebih lanjut, Ife memaparkan 22 prinsip pengembangan masyarakat (*community development*) yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: (Ife, 1995; Lukman, 2019) (1) Pembangunan terpadu (*Integrated Development*) (2) Konfrontasi dengan kebatilan struktural (*confronting structural disadvantage*) (3) Hak asasi manusia (*human rights*) (4) Keberlanjutan (*sustainability*) (5) Pemberdayaan

(*empowerment*) (6) Pribadi dan politik (*the personal and the political*) (7) Kepemilikan komunitas (*community ownership*) (8) Kemandirian (*self-reliance*) (9) Ketidaktergantungan pada pemerintahan (*independence from the state*) (10) Tujuan dan visi (*immediate goals and ultimate vision*) (11) Pembangunan bersifat organik (*organic development*) (12) Kecepatan gerak pembangunan (*the pace of development*) (13) Keahlian pihak luar (*external expertise*) (14) Membangun komunitas (*community building*) (15) Proses dan hasilnya (*process and outcome*) (16) Keterpaduan proses (*the integrity of the process*) (17) Tanpa kekerasan (*non-violence*) (18) Inklusif (*inclusiveness*) (19) Kosensus (*consensus*) (20) Kerja sama (*co-operation*) (21) Partisipasi (*participation*) (22) Mendefinisikan kebutuhan (*defining need*).

4. Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Pendekatan pengembangan masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan cara suatu program pembangunan dirancang, dilaksanakan, dan dikelola bersama masyarakat. Pendekatan ini menentukan posisi masyarakat dalam pembangunan, apakah hanya sebagai penerima manfaat atau sebagai pelaku utama yang ikut menentukan arah perubahan sosial yang diinginkan. Karena itu, keberhasilan pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan (Luna, 1999).

Dalam kajian pengembangan masyarakat, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Quimbo dkk. menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, pendekatan berbasis aset, pendekatan berbasis komunitas, pendekatan berbasis wilayah, pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat, pendekatan kesejahteraan, pendekatan spiritual-psikososial, dan pendekatan berbasis hak (Quimbo et al., 2018). Beragam pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan satu pola yang seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakter, serta potensi sosial budaya masyarakat setempat.

Pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam pengembangan masyarakat modern. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menentukan kebutuhan, prioritas, dan arah perubahan sosial mereka sendiri. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat pembangunan secara material, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas sosial, kemampuan mengambil keputusan, serta tumbuhnya rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan. Dalam pendekatan ini, pembangunan dipahami sebagai proses belajar sosial yang mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri.

Pendekatan berbasis komunitas dilakukan dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat pelaksanaan program pembangunan. Program dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat di lokasi tertentu dan dikelola bersama oleh masyarakat setempat. Berbeda dengan pendekatan berbasis komunitas, pendekatan berbasis wilayah memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup pengembangan suatu kawasan tertentu, seperti kawasan pertanian, kawasan pesisir, atau kawasan hutan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dalam satu wilayah secara terpadu.

Sementara itu, pendekatan kesejahteraan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat rentan dan marginal. Pendekatan ini banyak digunakan untuk membantu masyarakat miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, kelompok lansia, dan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial. Fokus utama pendekatan kesejahteraan adalah memberikan perlindungan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mereka dapat hidup secara layak.

Pendekatan spiritual-psikososial menempatkan pembangunan manusia sebagai bagian penting dari proses pengembangan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pembangunan ekonomi dan fisik, tetapi juga pembentukan nilai moral, spiritualitas, kepribadian, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Islam, pendekatan ini sangat relevan karena pembangunan masyarakat tidak hanya diarahkan pada peningkatan

kesejahteraan material, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki kekuatan akidah, akhlak, dan solidaritas sosial.

Selain itu, pendekatan berbasis hak memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak dasar dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pengembangan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bantuan sosial, tetapi sebagai proses menciptakan keadilan sosial dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan.

Dalam praktik pengembangan masyarakat, T. R. Batten membagi pendekatan pembangunan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pendekatan direktif dan pendekatan nondirektif (T. R. Batten, 1974). Pendekatan direktif atau instruktif dilakukan dengan asumsi bahwa pelaku perubahan telah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pendekatan ini, aktivis pengembangan masyarakat memiliki peran yang dominan dalam menentukan program, strategi, dan arah pembangunan. Masyarakat lebih banyak menerima program yang telah dirancang oleh pihak luar. Pendekatan ini sering digunakan dalam kondisi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan kapasitas dan membutuhkan arahan yang kuat dari pemerintah atau lembaga pembangunan (Adi, 2008).

Pendekatan direktif memang mampu menghasilkan perubahan yang relatif cepat, terutama dalam pembangunan fisik dan pelayanan administratif. Akan tetapi, pendekatan ini sering kali hanya menghasilkan perubahan jangka pendek karena masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar juga cenderung lebih tinggi sehingga keberlanjutan program menjadi kurang kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi pasif karena terbiasa menerima keputusan pembangunan dari pemerintah atau aktor eksternal lainnya.

Sebaliknya, pendekatan nondirektif atau partisipatif dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakat sebenarnya memahami kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi pelaku utama perubahan sosial, sedangkan aktivis pengembangan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator,

pendamping, dan penghubung sumber daya (Harisoesyanti & Annisah, 2020). Pendekatan ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menganalisis masalah, menentukan prioritas kebutuhan, dan menyusun langkah-langkah penyelesaian secara mandiri.

Pendekatan nondirektif bertujuan menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam menentukan arah kehidupannya sendiri (self-determination) serta membangun kemampuan menolong diri sendiri (self-help). Masyarakat didorong agar mampu menggali potensi lokal yang dimiliki dan membangun kekuatan kolektif untuk menghadapi persoalan sosial secara bersama-sama (Ningsih & Niken, 2022). Karena itu, keberhasilan pendekatan nondirektif sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kemampuan organisasi lokal, kepemimpinan komunitas, dan adanya kemauan bersama untuk melakukan perubahan sosial.

Dalam penerapannya, pendekatan direktif dan nondirektif tidak selalu dipertentangkan secara kaku. Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat. Pada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan kapasitas, pendekatan direktif dapat digunakan sebagai tahap awal untuk membangun kesadaran dan keterampilan sosial. Setelah masyarakat mulai berkembang dan memiliki kemampuan partisipasi yang lebih baik, pendekatan nondirektif dapat diperkuat agar masyarakat mampu menjadi pelaku utama pembangunan.

Batten juga menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat partisipatif membutuhkan tahapan proses berpikir sosial yang bertahap. Proses tersebut dimulai dari munculnya rasa tidak puas terhadap kondisi yang ada, kemudian berkembang menjadi kesadaran akan kebutuhan perubahan, munculnya keinginan untuk bertindak, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan tindakan bersama, hingga munculnya kepuasan terhadap hasil yang dicapai (Adi, 2012). Dalam setiap tahapan tersebut, aktivis pengembangan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menemukan kesadaran kolektif dan mengembangkan kemampuan sosial mereka.

Selain Batten, Twelvetrees membagi pendekatan pengembangan masyarakat ke dalam dua perspektif besar, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal (Twelvetrees, 1991).

Pendekatan profesional berfokus pada peningkatan pelayanan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan pembangunan kapasitas masyarakat secara teknis. Pendekatan ini bersifat lebih administratif dan menekankan perbaikan sistem pelayanan sosial yang sudah ada.

Sementara itu, pendekatan radikal lebih menekankan pada perubahan struktur sosial yang dianggap tidak adil. Pendekatan ini berusaha memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka dan mengurangi praktik diskriminasi sosial, ekonomi, maupun politik (Dominelli, 1990). Pendekatan radikal banyak digunakan dalam gerakan sosial berbasis kelas, gender, maupun kelompok minoritas yang mengalami ketimpangan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, pendekatan pembangunan masyarakat dapat dilihat dari strategi dakwah Rasulullah saw. dalam membangun masyarakat Madinah. Ismail dan Kilun menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan utama dalam pembangunan masyarakat Islam, yaitu takwin, tanzim, dan taudi' (Ismail & Kilun, 2007). Tahap takwin merupakan tahap pembentukan masyarakat melalui penguatan akidah, ukhuwah, dan solidaritas sosial. Pada tahap ini Rasulullah saw. membangun kesadaran kolektif masyarakat Islam melalui dakwah dan pembinaan komunitas.

Tahap berikutnya adalah tanzim, yaitu tahap penataan kehidupan masyarakat Islam melalui penguatan kelembagaan sosial dan pembangunan sistem sosial yang lebih teratur. Pada tahap ini Rasulullah saw. membangun masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat dan menyusun Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan sosial bersama antara masyarakat muslim dan nonmuslim (A. Ahmad, 1992b; J. Ahmad, 2020; Zarkasi, 2022). Tahap terakhir adalah taudi', yaitu tahap kemandirian masyarakat, ketika umat telah memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan manajerial untuk mengelola kehidupannya secara mandiri.

Model pembangunan masyarakat Islam tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan spiritual, solidaritas sosial, dan kapasitas kelembagaan masyarakat. Karena itu, pembangunan masyarakat Islam harus

berjalan secara seimbang antara pembangunan fisik, pembangunan moral, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat.

Secara teknis, proses pengembangan masyarakat juga dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Adi menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat umumnya dimulai dari tahap persiapan, assessment, perencanaan program, formulasi rencana aksi, implementasi program, evaluasi, hingga terminasi (Adi, 2008). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat bukanlah kegiatan yang bersifat instan, tetapi proses sosial yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahap persiapan, aktivis pengembangan masyarakat membangun hubungan awal dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial komunitas sasaran. Tahap assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, potensi, dan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) menjadi salah satu metode yang banyak digunakan untuk menggali potensi dan persoalan masyarakat secara partisipatif (Chambers, 1994).

Tahap berikutnya adalah penyusunan alternatif program dan formulasi rencana aksi. Pada tahap ini masyarakat bersama fasilitator menyusun prioritas program yang dianggap paling penting dan realistis untuk dilaksanakan. Setelah itu dilakukan implementasi program secara bersama-sama dengan menekankan kerjasama, partisipasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Tahap evaluasi menjadi bagian penting dalam pengembangan masyarakat karena berfungsi untuk menilai efektivitas program sekaligus memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama proses pelaksanaan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap aspek ketersediaan program, relevansi, keterjangkauan, pemanfaatan, kualitas, efisiensi, hingga dampak sosial yang dihasilkan (Adi, 2001; Feuerstein, 1987). Evaluasi yang partisipatif juga membantu masyarakat membangun sistem pengawasan internal yang lebih mandiri.

Tahap terakhir adalah terminasi, yaitu berakhirnya hubungan formal antara fasilitator dengan masyarakat. Meskipun demikian, terminasi tidak selalu berarti masyarakat telah sepenuhnya mandiri,

melainkan lebih menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan dasar untuk melanjutkan proses pembangunan secara lebih otonom.

Susan Kenny menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat berlangsung dalam siklus yang berkelanjutan, mulai dari tahap penemuan masalah, pembentukan kerjasama sosial, pemeliharaan program, hingga evaluasi dan pengembangan program lanjutan (Kenny, 2007). Sementara itu, Imam Santosa menegaskan bahwa pembangunan masyarakat menuju kemandirian membutuhkan proses perubahan yang bertahap, mulai dari munculnya kesadaran untuk berubah hingga terciptanya hubungan sosial yang stabil dan mandiri (Santosa, 2014).

Dalam konteks masyarakat berbasis kearifan lokal seperti nagari di Minangkabau, pendekatan pengembangan masyarakat yang paling efektif adalah pendekatan yang mampu memadukan nilai partisipasi, kelembagaan adat, kekuatan spiritual, dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek fisik sering kali tidak cukup kuat membangun perubahan sosial jangka panjang. Sebaliknya, pembangunan yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat akan lebih mudah diterima, dipelihara, dan diwariskan sebagai bagian dari budaya sosial masyarakat itu sendiri.

B. Partisipasi dan Komunikasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Proses pemberdayaan (*empowerment*) ditunjukkan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. (Payne, 1979)

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok,

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya.

Selama ini partisipasi masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat hanya dipandang sebagai raw power untuk menekan biaya pembangunan. Dalam keadaan demikian, partisipasi masyarakat "terbatas" pada implementasi atau implementasi program. masyarakat tidak dirancang untuk menciptakan dari dalam dan harus menerima keputusan dari "luar". Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan kurang "kesadaran kritis".

Terhadap pengertian partisipasi di atas terjadi tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi masyarakat yang lebih *genuine*, aktif dan kritis. Konsep yang baru tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan pengertian partisipasi yang aktif dan kreatif atau seperti yang dikemukakan oleh Paul bahwa partisipasi mengacu pada proses aktif di mana penerima manfaat mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya menerima bagian dari manfaat proyek.(Paul, 1987) Pengertian tersebut melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Cohen and Uphoff, 1980). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai "sadar" akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif.

Menurut Percy-Okunla dalam Nasdian, sintesis antara pengertian pemberdayaan dan partisipasi adalah Apa yang memberi makna nyata pada partisipasi rakyat adalah upaya kolektif oleh orang-orang yang bersangkutan untuk menarik upaya mereka dan sumber daya lain apa pun yang mereka putuskan untuk dikumpulkan bersama, untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Dalam hal ini partisipasi dipandang sebagai proses aktif di mana partisipasi mengambil inisiatif dan tindakan yang dirangsang oleh pemikiran dan pertimbangan mereka sendiri dan di atasnya hanya melibatkan orang-orang dalam tindakan mati telah dipikirkan atau didesak oleh orang lain dan dikendalikan yang lain tidak dapat diterima (Ferdian, 2014).

Oleh karena itu, pemberdayaan dan partisipasi di tingkat komunitas merupakan dua konsep yang erat kaitannya dan dalam konteks ini pernyataan Craig and Mayo, bahwa: "*empowerment is road to participation* (pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi)" (Mayo et al., 1995) adalah sangat relevan.

2. Komunikasi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat

Istilah "komunikasi sosial" dicetuskan dan diperkenalkan oleh Preparatory Commission on Communication pada 1962. Awalnya, digunakan secara bersama dengan kata "instrumen" sebagaimana dalam kata "instrumen komunikasi sosial", namun kemudian diperluas menjadi istilah "komunikasi sosial" yang mengandung makna lebih umum. Raymond B. Nixon mendapati pada 1980, dari 163 lembaga pelatihan komunikasi di Amerika Latin, 65 diantaranya telah mengadopsi "komunikasi sosial" dalam rancangan departemen atau fakultas di mana lembaga itu bernaung. Menelusuri kembali hingga ke tahun 1970, Dr. Nixon mendapatkan hanya 3 institusi yang mengadopsi istilah ini dan bahkan pada 1962 tidak ada satupun departemen komunikasi sosial di universitas-universitas di Amerika Latin. (Nixon, 1964)

Giorgio Braga, seorang penulis Italia, dalam bukunya *La Comunicazione Sociale* menyebutkan studi komunikasi sosial sebagai "studi tentang proses komunikatif dalam masyarakat" di mana menurutnya, mengacu kepada masalah semantik sebagaimana dan didasarkan pada sosiologi di mana menempatkan komunikasi sebagai

pusat kehidupan masyarakat. Braga lebih jauh menjelaskan bahwa hal ini bukanlah berarti mengabaikan komunikasi massa, namun lebih merupakan pendekatan pragmatis lantaran tidak mungkin untuk membangun batas yang jelas, sebab komunikasi terjadi di seluruh struktur sosial dan merupakan bagian dari proses sosiologi. Bukan tanpa alasan, Braga mengutip Ernst Cassirer yang mendefinisikan manusia sebagai *animal symbolicum*. (Cassirer, 1987) Kenyataannya, jika seseorang mengambil istilah komunikasi sosial secara serius, seseorang harus mendefinisikannya sebagai hubungan komunikatif antara anggota sistem sosial, alat-alat mereka, struktur dan proses. Hal ini akan memasukkan seluruh tindakan komunikatif umat manusia yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat manusia. Maka, komunikasi sosial tidak dapat dibatasi sebatas media massa, tetapi harus dipandang dalam konteks yang jauh lebih luas. Pidato seorang kepala *suku* di Afrika atau perayaan kegiatan publik di sebuah desa adalah komunikasi sosial, mengingat hal ini mempengaruhi kehidupan sosial orang.

Proses-proses dan pola-pola komunikasi dalam suatu komunitas mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangan komunitas itu sendiri. Menurut Franz-Josef Eilers, "*Communicating in Community tries to give some basics in Human Communication to conclude with considerations on Social Communication*" (Berkomunikasi dalam Community mencoba memberikan beberapa dasar-dasar dalam Komunikasi Manusia untuk diakhiri dengan pertimbangan tentang Komunikasi Sosial). (Eilers, 1994)

Perubahan dari *Human Communication* ke *Mass Communication* karena terjadi perubahan komunitas akibat proses industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Sehingga komunitas dicirikan dengan: *pertama*, peningkatan spesialisasi pembagian kerja. *Kedua*, penurunan pengaruh norma-norma dan nilai-nilai tradisional. *Ketiga*, peningkatan kontrol sosial formal. *Keempat*, Peningkatan diferensiasi sosial.

Oleh karena itu, menurut Josef Eilers, dalam perkembangan suatu komunitas diperlukan suatu proses-proses dan pola-pola komunikasi yang berlandaskan kepada komunikasi sosial. Komunikasi sosial dipahami sebagai suatu proses komunikasi yang

berlangsung dalam suatu masyarakat (komunitas). Elemen-elemen komunikasi sosial tersebut adalah: Pertama, *the numbers of participants*. Kedua, *publicness*. Ketiga, fungsi informasi, interpretasi, dan "*entertainment*". Keempat, *cultural group*. Dengan demikian, Komunikasi sosial dipahami bahwa komunikasi sosial tidak semata-mata mementingkan media massa yang berbeda dan teknologinya, tetapi lebih kepada interaksi manusia dalam ekspresi publik mereka dalam komunitas dan kelompok budaya masing-masing. (Eilers, 1994)

Dari pertimbangan ini kita dapat melihat bahwa komunikasi sosial tidak memfokuskan dan hanya membahas tentang berbagai media massa dan teknologinya, tetapi lebih pada interaksi antar manusia dalam ranah publik dalam masyarakat atau kelompok budayanya.

3. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial

Pembangunan kelompok sosial ekonomi kecil dan menengah harus menjadi tujuan utama kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Khususnya untuk membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan usaha produktif berbasis masyarakat. Oleh karena itu, universitas, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi melalui hubungan kelembagaan dan pendekatan jejaring sosial. Suatu pengembangan jaringan kelompok sosial ekonomi melalui sinergi fungsi berbagai pemangku kepentingan sebagai wujud pengembangan modal sosial. Salah satu alternatif dalam upaya pengembangan institusi sosial adalah pendekatan jaringan kelembagaan yang bersifat kolaboratif dari tingkat komunitas hingga lokal. Hal ini lebih bersifat informal dan partisipatif, dengan komitmen yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan yang mensinergikan kekuatan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan solusi bagi pengembangan usaha produktif di tingkat masyarakat (Ferdian, 2014).

Sistem sosial merupakan terjemahan harafiah dari istilah sistem sosial. Namun sebagian orang menggunakan istilah "lembaga sosial" untuk menggambarkan keberadaan faktor-faktor yang mengatur perilaku warga negara. Menurut Koentjaraningrat lembaga sosial adalah suatu sistem aturan perilaku dan relasional yang diarahkan

pada kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus yang kompleks dalam kehidupan masyarakat.(Koentjaraningrat, 1964) Definisi ini menekankan pada suatu sistem perilaku atau norma untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, konsep kelembagaan sosial yang dibicarakan dalam pembahasan ini bukanlah yang disebut dengan “institusi”, yang berasal dari kata “institusi” yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut lembaga seperti lembaga ilmu pengetahuan dan organisasi ekonomi dan berbagai bentuk organisasi dalam tujuan yang berbeda. Dalam sosiologi, yang dimaksud dengan kelembagaan sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Kelembagaan itu memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting (Polak, 1966). Sebagian besar sosiolog berpendapat bahwa kelembagaan itu bersifat suatu konsepsi dan bukan sesuatu yang konkret. Suatu kelembagaan adalah suatu kompleks peraturan-peraturan dan peranan-peranan sosial. Dengan demikian, kelembagaan memiliki aspek kultural dan struktural. Segi kultural berupa norma-norma dan nilai-nilai, dari segi struktural berupa berbagai peranan sosial. Kedua segi tersebut memiliki keterkaitan erat satu sama lain.

Modal sosial didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengacu kepada hasil dari suatu organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum (*world-view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal-balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal (*formal and informal groups*), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya (fisik, manusiawi, budaya), sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan.(Colleta & Cullen, 2000) Modal sosial memiliki empat dimensi. *Pertama* adalah integrasi (*integration*), yaitu ikatan yang kuat antar anggota keluarga, dan keluarga dengan tetangga sekitarnya. Contohnya, ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan, etnik dan agama. *Kedua*, pertalian (*linkade*), yaitu ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas asal. Contohnya, jejaring (*network*) dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan (*civic associations*), yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik dan

agama. *Ketiga*, integritas organisasional (*organizational integrity*), yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. *Keempat*, sinergi (*sinergy*), yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas (*state-community relations*).

Fokus perhatian dalam sinergi ini adalah apakah negara memberikan ruang yang luas atau tidak bagi partisipasi warganya. Dimensi pertama dan kedua berada pada tingkat horizontal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat, ditambah dengan pasar (*market*), berada pada tingkat vertikal. Pemahaman modal sosial lebih menekankan pada hubungan timbal-balik antara modal dan sifat sosial yang menjelaskan modal tersebut. Wujud modal yang dimaksud dapat dirasakan, dilihat, diandalkan, diharapkan dan digunakan. Modal merupakan potensi yang penggunaannya tergantung pada keputusan orang (*actor*) atau kelompok dengan dasar pertimbangan tertentu, bisa bersifat rasional, sosial, dan bisa pula psikologis. (Fukuyama, 2002) Selain itu, sesuai dengan sifat modalnya, modal sosial merupakan stok yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk efektivitas dan efisiensi proses produksi.

C. Pengembangan Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Wujud dari rasa tanggung jawab tersebut adalah sikap mendukung dari warga masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan proses-proses pembangunan yang dilaksanakan. Pentingnya peran serta warga masyarakat terutama karena sebagai organisasi dengan sistem terbuka, Pemerintah Daerah membutuhkan adanya *importation of energy* guna menopang kelangsungan hidupnya. Fakta membuktikan bahwa sumber energi berupa dana dan personil yang

sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah yang otonom, justru hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat.

Realitas seperti itu telah menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dari daerah terhadap pusat, dan dengan sendirinya menghilangkan kemandirian daerah. Bahkan, dari sudut pandang paling ekstrem, campur tangan pusat dalam penetapan kebijakan daerah merupakan konsekuensi logis dari tingginya ketergantungan tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka peran serta warga masyarakat sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai substitusi energi dari peran Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, peran serta warga masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi daerah untuk menggantikan sumber energi dari pusat. Agar warga masyarakat dapat berperan serta, sudah tentu mereka harus memiliki kemampuan untuk itu. Demikian pula harus disiapkan iklim yang menunjang ke arah tersebut. Hal itu merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan Pengembangan Masyarakat dengan memberdayakan warga masyarakat dan menciptakan iklim yang memungkinkan warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Damanik, 2019). Dengan demikian, dalam konteks pemberdayaan dan partisipasi warga masyarakat sangat erat keterkaitan antara pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah.

Konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya keterkaitan yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. Terutama pada tingkat pengambilan keputusan, upaya pengembangan masyarakat akan menciptakan beragam keterkaitan di tingkat kelompok, komunitas dan lokalitas. (Akmaruzzaman et al., 2013) Beragam keterkaitan tersebut (level organisasi) berhubungan secara fungsional karena sebagai suatu sistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Tingkat lokalitas dicirikan oleh kesatuan komunitas yang memiliki relasi sosial dan ekonomi, dengan pusat interaksi sebagai pusat pertumbuhan. Tingkat masyarakat diartikan sebagai kesatuan sosial dan ekonomi yang lebih mengacu pada sistem administratif/teritorial. Tingkat kelompok adalah kelompok masyarakat yang mendefinisikan dirinya berdasarkan ciri-ciri

tertentu, seperti ruang lingkup pekerjaan, kekerabatan, gender, dan lain-lain. Sedangkan ruang pertemuan terkecil adalah rumah. Organisasi ini berada di bawah pengaruh tiga tingkat organisasi di atasnya. Terlebih lagi, berbagai koneksi tersebut merupakan representasi dari hubungan korporat antara semua pihak yang terlibat dalam bidang yang sama.

Dalam konteks ini, konsep lokal mengandung pengertian: *Pertama*, ikatan sosial yang berlandaskan territorial yang mana masyarakat di daerah tersebut hidup dalam suatu lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas. *Kedua*, ikatan sosial berdasarkan lingkup pekerjaan (profesi) di mana hubungan antar anggotanya tidak permanen, tetapi mempunyai intensitas interaksi yang tinggi dalam suatu waktu tertentu. *Ketiga*, ikatan sosial yang dibangun berdasarkan jejaring sosial (*social networking*) sebagai nilai tambah dari *social capital* (modal sosial) dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat. Karena itu, secara sosiologis upaya pengembangan masyarakat perlu didekati dengan pengembangan berbasis lokal (daerah) yang menjalin ikatan sosial antara tingkat kelompok, komunitas dan lokalitas.

Secara konseptual, ada lima prinsip dasar dari *Community Based Development* (CBD). (Rubin, 1993) *Pertama*, untuk mempertahankan eksistensinya, CBD memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola. Namun, berbeda dengan organisasi bisnis, kendati pemungutan “fee” telah menjadi pertimbangan dalam CBD, tetapi keuntungan yang diperoleh harus dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. *Kedua*, CBD selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. *Ketiga*, dalam melaksanakan CBD, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Keempat*, dalam mengimplementasikan CBD harus dapat memaksimalkan sumberdaya (*resources*), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dari sponsor pembangunan sosial. *Kelima*, organisasi atau kelembagaan CBD harus lebih memfungsikan diri sebagai “catalyst” yang menghubungkan antara kepentingan

pemerintah lokal (*local government*), seperti pemerintah kota dan kabupaten, dan kepentingan masyarakat yang lebih bersifat mikro.

Berdasarkan kelima prinsip tersebut dapat dipahami bahwa CBD sangat menekankan pentingnya partisipasi warga komunitas, baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan, maupun pada tahap pengembangannya. CBD selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan keterampilan. Dan sumber dana bagi CBD umumnya berasal dari alokasi anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

Meskipun demikian CBD memiliki kelemahan. Sebagian besar program pemberdayaan masyarakat (*community based programs*), yang sampai sejauh ini mengklaim sebagai pendukung utama konsep CBD, belum mampu secara sempurna mengimplementasikan kelima kaidah tersebut. Kelemahan utama CBD di antaranya sumber dana yang dimiliki sangat tergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah. Bentuk bantuan dana dari pemerintah relatif bervariasi. Tiga di antaranya yang paling populer adalah dalam bentuk *block Grant*, Subsidi Biaya Administrasi, dan *Delegated Funding*. Bahkan dalam beberapa hal, organisasi pengelolaan CBD juga diberi hak untuk mengelola dana pinjaman kepada masyarakat untuk pengembangan usaha kecil.

Dominannya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah tersebut, tidak dapat dihindari, telah menyebabkan banyak program yang dikelola oleh organisasi tersebut menjadi tersendat, atau bahkan “*collapse*”, hanya karena pemerintah mengurangi, atau bahkan menghentikan alokasi dana yang biasanya didistribusikan. Sampai sejauh ini masih relatif kurang kemungkinan agar organisasi pengelola CBD menggali sumber-sumber pendapatan secara mandiri. Misalnya, melalui pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha produktif. Oleh karena itu, organisasi tersebut seharusnya mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha yang bersifat *profit oriented*. Dengan begitu, suatu program CBD akan dapat bertahan dan berkembang, kendati bantuan dana dari pemerintah harus dihentikan. Kelemahan lainnya adalah terlalu menitikberatkan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan program. Sementara, kualitas dari partisipasi warga komunitas

itu sendiri nyaris tidak mendapatkan perhatian. Pada konteks inilah perlu pemahaman akan pentingnya memasukkan variabel seleksi, sebagai unsur penentu dalam mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat, maupun dalam pengembangan hasil yang telah dicapai.

Dengan demikian dalam mengimplementasikan CBD, tidak dapat dihindari, harus melibatkan pemerintah lokal dalam bentuk *Local Government Policies*, maupun pihak swasta. Partisipasi dari pemerintah lokal dalam hal ini, antara lain memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki. Sementara partisipasi dari pihak swasta di bawah kebijakan pemerintah lokal sangat diperlukan, utamanya dalam bentuk pendanaan bagi pengembangan masyarakat. Untuk mengimplementasikan CBD yang berhubungan dalam suatu keseimbangan dinamis dengan *Local Government Policies*, maka perlu dibentuk organisasi pengelola CBD, yang tidak saja berfungsi sebagai “*catalyst*” antara pemerintah lokal dan masyarakat, tetapi juga memiliki tugas utama, antara lain: pertama, mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha produktif yang telah ditetapkan. Kedua, mengatur mekanisme mengembangkan modal usaha produktif. Dan ketiga, memfasilitasi pelaksanaan aktivitas pengembangan masyarakat. Untuk menghindari, atau paling tidak untuk mengurangi tingkat ketergantungan sumber pembiayaan dengan pihak sponsor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, maka organisasi pengelola CBD hendaknya tidak saja mengelola program-program yang bersifat *non-profit oriented*, tetapi juga harus mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha yang bersifat *profit oriented*.

D. Landasan Konseptual Pengembangan Masyarakat Islam

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat Islam

Konsep pengembangan masyarakat pada hakikatnya bukan sesuatu yang asing dalam ajaran Islam. Islam sejak awal hadir sebagai agama yang mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik, adil, bermartabat, dan sejahtera. Rasulullah saw. tidak hanya mengajarkan aspek ibadah ritual, tetapi juga membangun

sistem kehidupan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berkeadaban. Dorongan Islam terhadap pentingnya kerja keras, kemandirian, dan pemberdayaan sosial dapat dilihat dalam hadis Nabi saw.:

“Barangsiapa yang keluar dengan tali lalu kembali membawa seikat kayu bakar kemudian menjualnya, maka ia telah mendapatkan kehormatan. Perbuatan tersebut lebih baik daripada meminta-minta, baik diberi maupun tidak.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kemandirian, produktivitas, dan usaha sebagai bagian penting dari martabat manusia. Dalam konteks pengembangan masyarakat, ajaran tersebut mengandung pesan bahwa masyarakat harus didorong agar memiliki kemampuan untuk membangun kehidupannya sendiri melalui kerja, partisipasi, dan pengelolaan potensi yang dimiliki. Karena itu, pengembangan masyarakat Islam tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas bantuan sosial, tetapi juga proses pemberdayaan yang bertujuan membangun kekuatan umat secara menyeluruh.

Secara terminologis, pengembangan masyarakat Islam terdiri dari dua unsur utama, yaitu pengembangan (*development*) dan masyarakat Islam (*Islamic community*). Pengembangan diartikan sebagai proses memberdayakan, menguatkan, membina, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (E. Edison, 2010). Sementara itu, masyarakat Islam dipahami sebagai komunitas umat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sosialnya (Machendrawati & Safei, 2001). Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam dapat dimaknai sebagai proses terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan spiritual berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pengembangan masyarakat Islam tidak hanya berorientasi pada perubahan material, tetapi juga perubahan moral dan spiritual masyarakat. Karena itu, pembangunan dalam Islam selalu memadukan dimensi duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Islam memandang kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas akidah, akhlak, solidaritas sosial, dan keadilan

dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini menjadikan pengembangan masyarakat Islam memiliki karakter yang berbeda dengan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Nanih Machendrawaty menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, baik dalam lingkup keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), maupun masyarakat luas (ummah) (Machendrawati & Safei, 2001). Pengembangan tersebut dilakukan melalui pembinaan sosial, pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan umat agar masyarakat mampu hidup secara mandiri dan bermartabat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Amrullah Ahmad yang menegaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah Islam yang diwujudkan dalam bentuk penyelesaian persoalan-persoalan umat di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat secara luas (A. Ahmad, 1992a). Dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian ceramah keagamaan, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan, ketertinggalan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk kelemahan sosial lainnya.

Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat Islam memiliki orientasi yang bersifat individual sekaligus kolektif. Pada tingkat individual, pengembangan masyarakat Islam bertujuan membentuk pribadi muslim yang memiliki kesalehan spiritual, etos kerja, tanggung jawab sosial, dan kemampuan mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan pada tingkat kolektif, pengembangan masyarakat Islam diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki solidaritas sosial, kekuatan ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan mengelola kehidupan sosial secara mandiri (Nopryana & Susilowati, 2022).

Pengembangan masyarakat Islam juga berkaitan erat dengan pembangunan kelembagaan sosial umat. Sasaran pengembangan tidak hanya terfokus pada individu, tetapi juga pada terbentuknya sistem sosial dan organisasi masyarakat Islam yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, lembaga-lembaga Islam

seperti masjid, surau, majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga zakat memiliki posisi strategis sebagai media transformasi sosial masyarakat.

Ismail dan Kilun menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam dapat dipahami sebagai proses perubahan sosial yang terencana untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan Islam (Ismail & Kilun, 2007). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat Islam tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi diarahkan pada terciptanya kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat. Transformasi mustahik menjadi muzaki merupakan simbol perubahan masyarakat dari kondisi ketergantungan menuju kondisi berdaya dan mampu membantu orang lain.

Dalam perspektif pembangunan modern, pengembangan masyarakat Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol sumber daya, menentukan keputusan, dan memperjuangkan kepentingannya sendiri (Ife, J., & Tesoriero, 2014). Dalam Islam, konsep pemberdayaan tersebut sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwah Islamiyah*, *musyawarah*, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat muslim.

Selain itu, pengembangan masyarakat Islam juga memiliki hubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Karena itu, pembangunan masyarakat dalam Islam harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, keadilan distribusi ekonomi, dan keseimbangan hubungan sosial antar manusia (Ali, 2006). Pembangunan yang merusak lingkungan, menciptakan ketimpangan sosial, dan melemahkan nilai kemanusiaan bertentangan dengan prinsip dasar pembangunan dalam Islam.

Dalam praktiknya, pengembangan masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan dari potensi sosial budaya masyarakat lokal. Nilai

gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan kepemimpinan adat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan mandiri. Karena itu, pengembangan masyarakat Islam berbasis kearifan lokal menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun masyarakat yang tetap berakar pada identitas budaya sekaligus mampu menghadapi perubahan zaman.

Pada masyarakat nagari di Minangkabau, misalnya, prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menunjukkan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Integrasi tersebut menjadi fondasi penting dalam proses pembangunan masyarakat, karena masyarakat tidak hanya terikat oleh sistem pemerintahan formal, tetapi juga oleh nilai budaya dan struktur sosial adat yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pengembangan masyarakat Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi juga harus melibatkan kelembagaan adat, tokoh agama, dan partisipasi masyarakat secara kolektif.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam dapat dipahami sebagai proses perubahan sosial yang dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup umat dalam seluruh aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengembangan tersebut mencakup penguatan spiritual, pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, serta penguatan kelembagaan masyarakat agar umat mampu hidup mandiri, bermartabat, dan memiliki daya tahan menghadapi perubahan sosial. Dalam konteks masyarakat berbasis kearifan lokal, pengembangan masyarakat Islam bukan hanya menjadi strategi pembangunan sosial, tetapi juga menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan antara nilai agama, budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam

Prinsip-Prinsip dalam pengembangan masyarakat Islam adalah partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, dan keberlanjutan.(Muhtadi & Hermansyah, 2013) Partisipasi yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan;

“...dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38)

Prinsip ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, penilaian dan pengembangannya. Prinsip ini antara lain bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat; dari sekedar mendung, menghadiri, menjadi kontributor program pengembangan masyarakat. kemudian dapat menyegarkan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran pemimpin lokal. (Ali Aziz et al., 2005)

Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;

“Wahai manusia Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya”. (Q.S. Al-Hujurāt [49]: 13)

Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;

“...dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan Kami.” (Q.S. Al-Isrā' [17]: 70)

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah

mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 284).

Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan masyarakat harus sustainable, maksudnya pengembangan masyarakat harus berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh waktu. Prinsip yang berkelanjutan inilah yang oleh al-Quran disebut dengan *istiqomah* yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian lahir batin.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu. (Al-Fussilat: 30)

“Nabi SAW, ditanya: Amal apa yang paling dicinta? Nabi SAW, menjawab: berkelanjutan meskipun sedikit. Lakukanlah dari amal yang kamu kerjakan”. (HR. Bukhari)

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pengembangan masyarakat Islam tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial yang integral. Kelima prinsip tersebut saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang utuh dalam membangun masyarakat yang berdaya, adil, dan berkelanjutan. Partisipasi memperkuat keterlibatan aktif masyarakat, kesetaraan gender memastikan keadilan sosial, demokratis menjamin keterbukaan dan inklusivitas, transparansi dan akuntabilitas menjaga integritas pengelolaan, sedangkan keberlanjutan menjamin kontinuitas manfaat pembangunan.

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip ini menuntut adanya sinergi antara nilai-nilai Islam, kapasitas kelembagaan, serta peran aktor lokal dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam tidak hanya berorientasi pada perubahan struktural, tetapi juga transformasi nilai dan perilaku sosial yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

3. Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam

Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam adalah menghilangkan ketergantungan dalam seluruh matra kehidupan umat Islam. Untuk itu, ada dua tugas besar yang harus ditegakkan oleh umat Islam sebagai khalifah di bumi Tuhan. (Safei et al., 2020) *Pertama*, harus sanggup menata kehidupan sosial yang aman, bersatu, damai, dan berakhlak mulia. *Kedua*, sebagai *khalifatullah* umat Islam wajib menjadi insan yang inovatif, produktif, efisien, dan mandiri. Menurut Mulkhan, problem agama adalah pembebasan manusia dan dunia dari kemiskinan, konflik etnis, serta keagamaan juga penindasan atas nama negara, ideologi politik, bahkan agama. (Mulkhan, 1993) Karena itu, agama harus dipahami sebagai wacana kebudayaan. Bagaimanapun juga wahyu Tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan begitu disentuh oleh manusia. Praktik keagamaan dan dakwah yang berlebihan “mengurus Tuhan” akan membuat agama dan dakwah cenderung kurang manusiawi dan tidak peduli terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi manusia (Mulkhan, 1993). Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa upaya dakwah bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, melainkan sebuah proses transformasi sosial.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam memiliki fokus pada upaya memanusiakan manusia agar memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifatullah* di muka bumi. Dengan kata lain, pengembangan masyarakat Islam berpusat pada manusia (*antroposentris*) atau masyarakat (*people centered development*). Karena itu, pengembangan masyarakat Islam mesti dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses *tahawwul* (transformasi) dan *taghayyur* (perubahan) yang berarti sangat terkait dengan upaya *taghyirul ijtima'iyah* (rekayasa sosial). Dengan begitu, dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial. Untuk itu, aktifitas dakwah seharusnya aktivitas yang membawa konsekuensi perubahan sosial, tingkah laku dan inovasi yang terencana, sistematis dan terukur. Hal tersebut sejalan dengan teori perubahan sosial, inovasi, dan perubahan tingkah laku.

a. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yaitu perubahan susunan kemasyarakatan dari suatu sistem sosial pra-industrial (agraris misalnya) ke sistem industrial. Terkadang disejajarkan dengan perubahan dari masyarakat pra modern ke masyarakat modern. Atau, dalam peristilahan yang sering digunakan adalah perubahan dari keadaan negara kurang maju (*less developed country*) ke keadaan negara yang lebih maju (*more developed country*). Dalam konsep Islam, perubahan sosial (*social change*) pada sebuah masyarakat merupakan *sunnatullah*. Perubahan sosial yang terjadi pada masa sekarang sangat kompleks. Perubahan yang terjadi begitu cepat ini, selain menimbulkan hal-hal yang positif juga menimbulkan hal yang negatif. Bukan hanya di ekonomi dan politik, tetapi lebih dari itu ia merambah bidang lainny seperti hukum, budaya dan moral. (Amin, 2009)

Secara teoritis, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Pendapat *pertama* percaya bahwa masyarakat berubah karena ide, pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai. Menurut penganut pendapat ini, penyebab utama perubahan adalah ide. Max Weber sebagai tokohnya, banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat. Sejumlah peneliti Max Weber juga mengatakan, tesis utama dari Weberianisme adalah pengakuan terhadap peranan besar ideologi sebagai variabel independen bagi perkembangan masyarakat (Ali Aziz et al., 2005).

Sudah tentu strategi perubahan sosial sangat bergantung pada apa yang dianggap sebagai sebab-musabab terjadinya perubahan. Nabi misalnya, awalnya datang dengan mengubah pandangan dunia individu masyarakat. Pada saat Al-Qur'an diturunkan, beliau mengubah dan memperkaya makna idiom-idiom yang sebelumnya sudah ada pada masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, makna takwa tidak lebih dari takut. Sesudah datang AL-Qur'an, kata takwa diberi makna yang lebih luas.

Hal tersebut bermakna, bahwa Al-Qur'an melakukan perubahan sosial melalui ide. Al-Qur'an memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perubahan dan pembaruan ide. Bahkan, Allah memperingatkan jangan sampai orang-orang kafir menyebabkan berubahnya pandangan atau ide di kalangan umat Islam.

Kedua, yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam sejarah manusia itu sebenarnya adalah *great individuals* (tokoh-tokoh besar) yang sering juga dikenal sebagai hero (pahlawan). Salah satu pengikut teori ini adalah Thomas Carlyle (1795-1881). Carlyle menulis buku yang berjudul *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroes in history* (Para Pahlawan, Pemujaan-Pahlawan, dan Kepahlawanan dalam Sejarah). Carlyle juga menyatakan bahwa “sejarah dunia adalah biografi orang-orang besar”. Oleh sebab itu, menurut para pakar seperti Carlyle, perubahan sosial terjadi karena munculnya seorang tokoh atau pahlawan yang dapat menarik simpati para pengikut setianya. Selanjutnya bersama-sama dengan simpatisan tersebut, sang pahlawan melancarkan gerakan untuk mengubah masyarakat. Inilah yang menurut pakar sosiologi disebut dengan *great individuals as historical force*.

Dalam catatan sejarah Islam, terutama berkaitan dengan proses penyebaran dakwah Islam periode awal, baik di Mekkah maupun Madinah, meskipun tidak berjalan mulus, namun telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Hal tersebut tidak terlepas dari kehadiran Rasulullah saw. sebagai *agent of change*. Peran Rasulullah saw. sebagai agen perubahan telah memposisikan beliau sebagai Pahlawan bagi sebagian masyarakat Arab kala itu. Ruh kepahlawanan Rasulullah saw. telah menarik simpati pengikutnya dan bersedia untuk bersama-sama melakukan gerakan-gerakan pembaharuan yang membawa dampak perubahan sosial. Dalam setiap langkah gerakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, selalu dibayangi kekuatan kafir Quraisy yang terus melakukan penolakan. Ada yang melakukan penolakan dengan cara-cara yang halus, tetapi tidak jarang juga yang melakukan dengan cara-cara yang kasar dan teror psikologis.

Penolakan tersebut terjadi karena banyak faktor, di antaranya; persoalan akidah, sosial, ekonomi, bahkan persoalan politik kekuasaan. Belakangan diketahui bahwa tantangan dan ancaman itu, justru berdatangan dari kalangan keluarga Nabi sendiri, seperti penolakan Abu Jahal dan Abu Lahab yang merupakan tokoh yang berasal dari klan bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib. Mereka menentang gerakan Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Tuhan dan kemanusiaan yang dianggap bertentangan dengan arus utama

(*mainstream*) kepercayaan masyarakat Kota Mekkah, yang mayoritas penyembah berhala. Namun, dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan gerakan perubahan melalui berbagai pendekatan, materi, dan metode yang disampaikan telah mampu menarik perhatian masyarakat, bagi mereka Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pahlawan yang datang untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat diri mereka, serta membebaskan mereka dari belenggu intimidasi dan penindasan orang-orang kuat kafir Quraisy ketika itu, sehingga banyak masyarakat Mekkah maupun Madinah dari berbagai kalangan yang akhirnya menerima ajaran Islam yang beliau bawa, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Akhirnya, semua hambatan dan tantangan dapat dihadapi dengan baik, sehingga Islam berkembang dengan baik pula. (Murodi, 2013)

Ketiga, perubahan sosial dapat terjadi karena munculnya *social movement* (gerakan sosial). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) meskipun kecil termasuk gerakan sosial. Berbagai LSM di luar negeri telah terbukti bisa melakukan gerakan perubahan sosial. Yayasan juga dapat berfungsi sebagai organisasi gerakan sosial. (Ali Aziz et al., 2005)

Perubahan sosial di Indonesia terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-XVII hingga pertengahan abad ke-XX, secara kultural masyarakat Barat Modern menjadi *agent of change* dan secara politis maupun kultural, Belanda menetapkan corak dan arah perubahan sosial di Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, Kristen mulai menampakkan kegiatannya dengan memberikan pelayanan konkrit kepada masyarakat. Sampai tahap ini, masalah yang dihadapi dakwah Islam semakin kompleks dan sebagai suatu sistem di lingkungan berbagai masalah sosial, keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Dengan munculnya kenyataan sosio-kultural baru, lahirlah kesadaran baru di kalangan pendukung dakwah dan da'i secara silih berganti. Kesadaran ini ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga dakwah seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Meskipun secara detail kesadaran itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ada "benang hijau" yang mempertemukan perbedaan itu, yaitu kesadaran transendental untuk menanyakan kembali "apa yang

seharusnya terjadi dalam kenyataan sosial sosial menurut ajaran Islam?” dengan “yang senyatanya terjadi dalam realitas” yang harus diubah oleh sistem dakwah. Dalam kerangka yang demikian, maka dakwah Islam berada dalam proses “transendensi” dan “imanensi” yang diwujudkan dalam upaya mencari model yang mampu menggambarkan kenyataan secara jelas dan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Sementara para da'i dan pendukung dakwah sedang mencari orientasi dalam menentukan model yang hendak digunakan, perubahan sosio-kultural yang digerakkan ilmu dan teknologi terus berlangsung. Dampak perubahan menyentuh langsung lembaga/organisasi dakwah yang ditandai dengan ketidakmampuan melihat masalah secara jelas, tema dakwah yang lama mulai kehilangan relevansinya dan model dakwah yang ada tidak dapat untuk melihat dan memecahkan masalah yang sudah semakin rumit. Sedangkan pembangunan nasional yang merupakan upaya perubahan sosial yang direncanakan, khusus dalam bidang agama belum memberikan alternatif pembangunan sistem dakwah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien (Achmad, 1983).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya perubahan sosial membawa dampak yang sangat signifikan terhadap proses dakwah Islam di kalangan masyarakat. Cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak masyarakat berubah dengan cara drastis terhadap fenomena keberagamaan masyarakat. Dalam hal ini dakwah Islam harus mampu mengimbangi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat untuk mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif demi tegaknya dakwah di kalangan masyarakat. Hal tersebut menuntut para pendukung dakwah untuk merekonstruksi konsep dakwah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus berubah untuk dapat menjawab berbagai persoalan umat yang semakin kompleks.

Dakwah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun akhirat.(Ali Aziz et al., 2005) Sasaran utamanya tercipta suatu tatanan sosial yang di dalamnya hidup sekelompok manusia dengan penuh kedamaian, keadilan keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Karena itu, dakwah mesti dipahami

sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses *tahawwul* (transformasi) dan *taghayyur* (perubahan) yang berarti sangat terkait dengan upaya *taghyirul ijtima'iyah* (rekayasa sosial).

Dengan begitu, dakwah sangat terkait dengan perubahan sosial. Untuk itu, aktifitas dakwah seharusnya aktivitas yang membawa konsekuensi perubahan sosial yang terencana, sistematis dan terukur. Jadi dakwah bukan hanya sekedar ceramah agama, dengan songkok dan sorban dikalungkan kemudian berpidato di atas panggung, di layar televisi atau dari satu masjid ke masjid lainnya dengan suara lantang dan berbagai gaya, tapi dakwah yang mesti dibangun oleh para da'i dalam menegakkan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah dakwah dalam bentuk pengembangan masyarakat Islam (*Islamic Community Development*). Da'i yang berperan sebagai pelaku *Islamic Community Development* disebut dengan *Aktivis pengembangan masyarakat*.

Pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamisasi kelembagaan.

Pengembangan masyarakat dapat pula disebut suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.(Soharto, 2017) Dengan begitu, pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada lagi yang mengartikan pengembangan masyarakat Islam dengan suatu strategi dan aksi perubahan berencana dan sistematis, untuk mengembangkan mustahik menjadi muzakki dengan menggunakan medium lembaga

Islam atau organisasi kemasyarakatan Islam agar tercipta masyarakat Islami atau madani (Ismail & Kilun, 2007).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka pengembangan masyarakat Islam dapat didefinisikan dengan usaha bersama dan strategi perubahan berencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam dalam segala bidang kehidupannya melalui pendayagunaan segala potensi yang ada pada mereka agar dapat berkembang secara partisipatif dan hidup sesuai ajaran Islam dengan menggunakan medium perubahan kelembagaan Islam atau organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Islam.

Dalam pengertian lain yang agak disederhanakan, pengembangan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Berdasarkan pemaparan sederhana di atas, menjadi jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan yang dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas. Untuk itu, pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya umat (SDU) mulai dalam lingkup kecil, seperti keluarga atau jamaah pengajian, sampai pada lingkup besar, seperti masyarakat suatu nagari, kecamatan, kota atau negara, harus menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian seluruh lembaga dakwah Islam dan siapa pun dari kalangan umat Islam secara terencana dan sistematis. Sehingga akan muncul umat Islam yang berkualitas unggul yang mampu bersaing dengan sumber daya luar dan tidak menjadi proletariat-proletariat yang hidup di zaman modern. Proletariat merujuk pada pengertian pekerja-pekerja yang cenderung mengandalkan otot dengan sedikit kemampuan otak, pasangannya adalah kognitariat yang berarti tenaga-tenaga terampil yang cenderung lebih banyak menggunakan kemampuan kognisinya. Hal pertama yang harus ditanamkan dalam upaya pengembangan dan

peningkatan kualitas diri adalah komitmen untuk memperbaiki diri secara terus-menerus (*committed to continuous improvement*).

b. Inovasi

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. (Sutarno, 2012) Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Namun, menurut Fontana, mengungkapkan bahwa inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.(Fontana, 2009) Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan faktor fundamental dalam penentu perubahan ekonomi.(Rahman, 2019)

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. (Dama & Ogi, 2018; Setiamy & Deliani, 2019; Suryani, 2008) Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.(Setijaningrum, 2017)

Pemahaman ini sejalan dengan Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd yang juga mengatakan bahwa inovasi tidak terbatas pada benda atau barang produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam

segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. (K & Shepherd, 2010)

Karakteristik inovasi yang mempengaruhi cepat lambat penerimaan informasi menurut Everett M. Rogers (Rogers, 2003), sebagai berikut:

- 1) Keunggulan relatif (*relative advantage*) – Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.
- 2) Kompatibilitas (*compatibility*) - Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
- 3) Kerumitan (*complexity*) - Kompleksitas ialah, tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
- 4) Kemampuan diujicobakan (*trialability*) – Kemampuan untuk diujicobakan adalah di mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat di adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulan.

- 5) Kemampuan untuk diamati (*observability*) - Yang dimaksud dengan dapat diamati ialah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.

c. Perubahan Tingkah Laku

Perubahan perilaku sering menjadi tujuan staf yang bekerja secara langsung dengan konstituen, organisasi, pemerintah, atau masyarakat. Individu yang dibebankan dengan tugas ini dapat dianggap sebagai "intervensionis" yang tujuannya adalah untuk merancang dan mengimplementasikan program atau intervensi yang menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. (Glanz et al., 2008)

Menurut Hosland dalam Notoatmodjo, mengatakan bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus (rangsangan) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Stimulasi yang tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu dan berhenti sampai disini. Stimulus yang diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Stimulus telah mendapat perhatian dari organisme maka stimulus akan dimengerti dan dilanjutkan kepada proses selanjutnya. Organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya atau bersikap. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. (Notoatmodjo, 2012)

Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, baik dari peran pranata keluarga, teman, lingkungan, atau dari diri mereka sendiri serta disebabkan oleh adanya inovasi dalam masyarakat. Proses perubahan tersebut sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan orang tersebut. Menurut World Health Organization (WHO), perubahan perilaku mempunyai tiga bentuk, yaitu;

- 1) Perubahan alamiah (*natural change*): perubahan perilaku ini

terjadi secara alamiah dalam diri manusia. Contoh: perubahan fisik dari muda ke tua.

- 2) Perubahan terencana (*planned change*): perubahan perilaku yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Contoh: seseorang pengangguran yang ingin merubah nasibnya dengan berwirausaha agar mendapat penghidupan yang layak.
- 3) Kesiapan perubahan (*readiness to change*): perubahan perilaku yang terjadi karena adanya proses internal (*readiness*) pada diri seseorang. Proses internal pada diri seseorang sangatlah variatif. Terakhir Perubahan yang terjadi terutama pada perubahan terencana dan kesiapan perubahan tentu terjadi dengan sejumlah strategi. Beberapa strategi-strategi yang dilakukan dalam perubahan perilaku seperti:
 - a) *Inforcement*: strategi perubahan ini dilakukan dengan cara paksaan dengan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan. Strategi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat namun tidak berlangsung lama.
 - b) *Education*: strategi perubahan perilaku ini dilakukan dengan pemberian pengajaran, informasi, atau penyuluhan. Pelaksanaan strategi ini memakan waktu yang cukup banyak namun dapat menghasilkan perubahan perilaku yang tahan lama. Seperti halnya perilaku manusia, perilaku sosial juga dipelajari di berbagai Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni: sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, ilmu hukum, ilmu politik, dan psikologi.

Perubahan perilaku pada diri manusia didukung oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor Internal. Perilaku manusia merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki manusia akibat dari pengaruh sikap, emosi, adat istiadat, etika, genetika, kekuasaan, dan persuasi atau bujukan. Faktor perubahan perilaku ini terjadi di dalam diri manusia, dimana bentuk-bentuk faktor internal tersebut antara lain: Jenis ras/keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, intelegensia, dan terakhir adalah bakat. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pemicu perubahan perilaku manusia yang terjadi di luar diri manusia, diantaranya: pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2006). *Islam dan masyarakat: pantulan sejarah Indonesia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987.
- Achmad, A. (1983). *Dakwah islam dan perubahan sosial*. PLP2M.
- Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. (1992a). *Dakwah Islam dan perubahan sosial*. PLP2M.
- Ahmad, A. (1992b). *Kerangka Teori dan Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Proyek MIT.
- Ahmad, J. (2020). *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*. Depublish.
- Akmaruzzaman, Sumardjo, & Hariyoga, H. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(1), 47–60. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i1.24193
- Ali, A. Y. (2006). *The Holy Qur'an: Text, translation and commentary*. Amana Publications.
- Ali Aziz, M., Halim, A., & Suhartini, R. (2005). *Dakwah pemberdayaan masyarakat : Paradigma aksi metodologi*. Pustaka Pesantren.

- Amin, S. M. (2009). *Ilmu Dakwah*. Amzah.
- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Arrasuli, S. (2003). *Pertalian adat & syara'*. Ciputat Press.
- Asnan, G. (2003). *Kamus sejarah Minangkabau*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Azizy, A. Q. (2004). *Melawan globalisasi : reinterpretasi ajaran Islam (persiapan SDM dan terciptanya masyarakat madani)*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2003). *Surau: Pendidikan Islam tradisional dalam transisi dan modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2004). *Menuju Masyarakat Madani*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2023). Kecamatan Lembah Gumanti dalam Angka 2023. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok*. Badan Pusat Statistik.
- Bakti, A. F. (2004). *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia : South Sulawesi Muslim perceptions of a global development program*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Batten, D. J. (1973). Use of palynologic assemblage-types in Wealden correlation. In *Palaeontology* (Vol. 16, pp. 1–40).
- Batten, T. R. (1974). The Major Issues and Future Direction of Community Development. *Community Development Journal*, 9(2), 96–103. <https://www.jstor.org/stable/44255653>
- Cassirer, E. (1987). *Manusia dan kebudayaan: sebuah esai tentang manusia*. PT Gramedia.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Christenson, J. A., & Robinson, J. W. (1989). *Community development in perspective*. Iowa State University Press.

- Clark, J. (1991). *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. Kumarian Press.
- Colleta, N. J., & Cullen, M. L. (2000). *Violent conflict and transformation of social capital: Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia* (Vol. 11, Issue 3). The World Bank.
- Dama, J., & Ogi, I. W. J. (2018). Pengaruh Inovasi Terhadap Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 41–50.
- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 171–186. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>
- Dominelli, L. (1990). *Woman and Community Action*. Venture Press.
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Edison, E. (2010). *Pengembangan sumber daya manusia*. Alfabeta.
- Edison, M. S. (2010). *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia.
- Eilers, F.-J. (1994). *Communicating in Community: An Introduction to Social Communication*. Logos Publications.
- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern* (Esposito (ed.); 1st ed.). Mizan.
- Ferdian, N. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Buku Obor Indonesia.
- Feuerstein, M.-T. (1987). *Partners in Evaluation: Evaluating Development and Community Programmes with Participants*. Macmillan Education.
- Fontana, A. (2009). *Innovate We Can!: Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu, Organisasi, Masyarakat*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* (11th ed.). Herder and Herder.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (reprint). Free Press.

- Fukuyama, F. (2002). *Trust: kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran*. Penerbit Qalam.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Gilchrist, A., & Taylor, M. (2022). *The Short Guide to Community Development* (3rd ed.). Policy Press.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2008). *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*____ _ _ _ _ . Beacon Press.
- Hakimy, I. (1994). *Pokok-pokok pengetahuan adat Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.
- Hamidullah, M. (1958). *The First Written Constitution in the World*.
- Hamka. (1968). *Islam dan adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas.
- Harisoesyanti, K. S., & Annisah, A. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Masyarakat Di Komunitas Miskin Perkotaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 220-232. <https://doi.org/10.21632/jpmi.2.2.220-232>
- Hidayat, K., & Azra, A. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta The Asian Foundation.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (5th ed.). Pearson Education.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Longman.
- Ismail, A. U., & Kilun, Y. (2007). *Pengembangan komunitas Muslim: pemberdayaan masyarakat Kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jean L. Cohen, A. A. (1994). *Civil Society and Political Theory : Studies in Contemporary German Social Thought*. MIT Press.

- K, A. P., & Shepherd, C. D. (2010). *Innovation management: context, strategies, systems, and processes*. Pearson Prentice Hall.
- Kenny, S. (2007). *Developing communities for the future*. Thomson.
- Khaldun, I. (1989). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Franz & Rosentha (eds.); Terj.). Bollingen Series Princeton University Press.
- Koentjaraningrat. (1964). *Pengantar Antropologi*. Universitas Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Rineka Cipta.
- Lukman. (2019). Pengembangan masyarakat sebagai konsep dakwah. *Jurnal Bina Ummat*, 2(2), 21–44. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i02.49>
- Luna, E. (1999). Rethinking community development in the Philippines: Indigenizing and regaining grounds In V.A. Miralao (Ed.). In *The Philippine social sciences in the life of the nation* (1st ed., pp. 315–343). Philippine Social Science Council.
- Machendrawati, N., & Safei, A. A. (2001). Pengembangan Masyarakat Islam. In *cet. 1* (p. 285p). Remaja Rosdakarya.
- Mansoor, M. (2008). *Perilaku Keberagamaan Remaja Kasus Pada Siswa SLTA Di Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Sukabumi Dan Kabupaten Lebak*. Institut Pertanian Bogor.
- Mayo, M., Craig, G., & (Eds.). (1995). *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. Zed Books.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: THEORY & PRACTICE* (N. Aguilera (ed.)). SAGE Publications, Inc.
- Moallemi, E. A., Malekpour, S., Hadjidakou, M., Raven, R., Szetey, K., Ningrum, D., Dhiaulhaq, A., & Bryan, B. A. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale. *One Earth*, 3(3), 300–313. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.006>
- Muhtadi, & Hermansyah, T. (2013). *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*. UIN Jakarta Press.

- Mulkhan, A. M. (1993). *Paradigma intelektual Muslim : pengantar filsafat pendidikan Islam dan dakwah*. SIPRESS.
- Murodi. (2013). *Dakwah Islam dan Tantangan Masyarakat Quraisy, Kajian Sejarah Dakwah pada Masa Rasulullah SAW*. Kencana.
- Naim, M. (2013). *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau*. PT Raja Grafindo.
- Navis, A. A. (1984). *Alam takambang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti PerS.
- Ningsih, R. W., & Niken, F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *LITERASIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, 1(1), 42–52.
- Nixon, R. B. (1964). Introduction. *Journalism Quarterly*, 42(1), 5–6. <https://doi.org/10.1177/10776990640420S101>
- Nizar, H. (2003). *Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Nizar, S. (2003a). *Falsafah Adat Minangkabau*. Yayasan Pendidikan Minangkabau.
- Nizar, S. (2003b). *Falsafah adat Minangkabau dan relevansinya dalam pendidikan Islam*. Hayfa Press.
- Nopryana, R. D., & Susilowati, I. (2022). The Relation of Religion and Culture in the Review of Indonesian Islamic Community Development. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 5(3). <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.215>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Paul, S. (1987). *Community Participation in Development Projects: The World Bank Experience*. World Bank.
- Payne, M. (1979). *Modern Social Work Theory*. MacMillan Press LTD.
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2014). A framework for community and economic development. *An Introduction to Community Development: Second Edition*, 3–21.
- Polak, J. B. A. F. M. (1966). *Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas* (5th ed.). Ichtiar Baru.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in*

modern Italy. Princeton University Press.

- Quimbo, M. A. T., Perez, J. E. M., & Tan, F. O. (2018). Community development approaches and methods: Implications for community development practice and research. *Community Development*, 49(5), 589–603. <https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1546199>
- Raharjo, M. D. (1999). *Masyarakat madani: agama, kelas menengah dan perubahan sosial*. LP3ES.
- Rahman, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Inovasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt . Pln (Persero) Area Manado. *Jurnal EMBA*, 7(1), 301–311. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.22363>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Ross, C., Clarke, A., McConnell, C., Lachapelle, P., & Stansfield, J. (2018). Towards shared international standards for community development practice. *International Association for Community Development*, 1–36. www.iacdglobal.org/category/resources/magazine
- Rothman, J. (1968). Three models of community organization practice. In *Social work practice* (pp. 16–47). Columbia University Press.
- Rothman, J. (1996). The Interweaving of Community Intervention Approaches. *Journal of Community Practice*, 3(3–4), 69–99. https://doi.org/10.1300/J125v03n03_03
- Rothman, J., Erlich, J. L., & Tropman, J. . (2001). *Approaches to community intervention. Strategies of Community Intervention* (6th ed.). F. E., Peacock.
- Rubin, J. . (1993). Understanding the Ethos of Community-Based Development: Ethnographic Description for Public Administrator. *Public Administration Review*, 53(5), 428–437.
- Safei, A. A., Ono, A., & Nurhayati, E. (2020). *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat* (1st ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Santosa, I. (2014). *Pengembangan Masyarakat berbasis Sumber Daya Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Sefriyono. (2018). Kearifan Lokal bagi Pencegahan Radikalisme Agama: Kerjasama Kelembagaan Adat Minangkabau dan Islam

bagi Pencegahan Radikalisme Agama di Sumatera Barat. *Tesis*, iii.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom A Borzoi book*. Knopf.

Setiamey, A. A., & Deliani, E. (2019). Strategi inovasi dan kinerja industri rumahan dalam meningkatkan minat pembelian konsumen di pasar sukaramai medan. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 1–19.

Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia. In *Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR*. Airlangga University Press.

Soharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (A. Gunarsa (ed.); 7th ed., p. 274). PT. Refika Aditama.

Soim, M. (2015). Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam). *Jurnal Dakwah Risalah*, 26(1), 23–32. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1211>

Stockdale, J. D. (1976). Community Organization Practice: An Elaboration of Rothman's Typology. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 3(5). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.1146>

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Suryani, T. (2008). *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). Graha Ilmu.

Sutarno. (2012). *Serba Serbi Manajemen Bisnis*. Graha Ilmu.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Tt. (2015). *community development*. UNTERM.

Twelvetrees, A. (1991). Social Planning Approaches to Community Work. In *Community Work* (pp. 98–139). Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21262-0_5

- Waitlem. (2003). *Surau*. PT. Intimedia.
- Walinagari Sungai Nanam. (2018). *Monografi Nagari Sungai Nanam 2018* (F. Yanti, L. Engriani, K. M. K. Adrizal, Warjono, M. Imam, & Y. D. R. A. Azwar (eds.)).
- Wardani. (2002). Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *SUHUF, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, XIV*(1).
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Yulia, M., Faisal, Y., & Zahara. (2018). Wakaf Tanah Ulayat Sebagai Solusi Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Secara Permanen Di Sumatera Barat. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(1), 41–60.
- Zainuddin, R. (1992). *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zarkasi, A. (2022). *Model Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Sakai Sambayan: Studi Tentang Gerakan Pembangunan Desa Di Kabupaten Pesawaran* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20635>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik* (1st ed.). Kencana: Prenada Media Group.

GLOSARIUM

Abu Thalib

Tokoh suku Quraisy yang memberikan perlindungan sosial kepada Rasulullah saw.

Accessibility (Keterjangkauan)

Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan atau program.

Accountability (Akuntabilitas)

Kewajiban mempertanggungjawabkan proses dan hasil program kepada publik.

Action Research (Penelitian Tindakan)

Pendekatan riset yang bertujuan memecahkan masalah sekaligus menghasilkan perubahan sosial.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Prinsip dasar masyarakat Minangkabau bahwa adat bersumber dari ajaran Islam, dan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Administrasi Pembangunan

Proses pengelolaan dokumen, laporan, dan prosedur formal dalam pembangunan.

Advocacy (Advokasi)

Upaya sistematis mempengaruhi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Agent of change

Individu atau pihak yang mempelopori perubahan sosial.

Agropolitan

Konsep pembangunan wilayah berbasis pertanian sebagai pusat ekonomi.

Akidah

Keyakinan dasar dalam ajaran Islam.

Akses Pelayanan Kesehatan

Kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.

Aksi sosial

Kegiatan kolektif untuk memperjuangkan perubahan sosial, terutama bagi kelompok tertindas.

Aktor kunci

Pihak utama yang memiliki peran strategis dalam suatu proses atau sistem.

Akuntabilitas

Kewajiban pemerintah atau pelaksana untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Alam Takambang Jadi Guru

Falsafah Minangkabau yang menekankan bahwa alam dan kehidupan menjadi sumber pembelajaran dan pengembangan pengetahuan.

Amal Shaleh

Perbuatan baik yang memberi manfaat bagi individu dan masyarakat.

Ambisi Kepemimpinan

Keinginan pemimpin untuk menunjukkan kinerja atau prestasi pribadi.

Anak Kemenakan

Anggota suku dalam sistem kekerabatan Minangkabau di bawah tanggung jawab mamak.

Anak Nagari

Anggota masyarakat dalam satu nagari yang memiliki ikatan sosial, adat, dan kekerabatan.

Antroposentris

Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Asesmen Lapangan

Proses pengumpulan data langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata.

Ashabiyah

Solidaritas sosial dalam konsep Ibn Khaldun yang mengikat anggota kelompok melalui kesadaran kolektif, persatuan, dan kepentingan bersama.

Aspirasi Masyarakat

Usulan, kebutuhan, atau harapan masyarakat terhadap pembangunan.

Assessment (Pengkajian)

Proses identifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat.

Assessment (pengkajian)

Proses identifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat sebagai dasar perencanaan program.

Asset-Based Approach

Pendekatan yang menekankan pemanfaatan potensi dan aset lokal.

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

Lembaga legislatif di tingkat nagari yang berfungsi membahas, menetapkan, dan mengawasi kebijakan nagari.

Bai'at

Kesepakatan atau komitmen antara pemimpin dan anggota komunitas dalam membangun sistem sosial atau keagamaan.

Bajanjang naiak, batanggo turun

Sistem berjenjang dalam pengambilan keputusan dan pembinaan dalam struktur adat.

Balambai Ari

Tradisi gotong royong berbasis suku berupa pertukaran tenaga kerja dalam kegiatan pertanian secara bergiliran.

Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur

Konsep masyarakat ideal dalam Islam yang sejahtera, aman, dan mendapat ampunan Allah.

Bantuan Tunai

Bantuan langsung berupa uang kepada masyarakat atau lembaga.

Bareh Pacik

Tradisi perempuan Minangkabau menyisihkan beras atau uang dari kebutuhan harian sebagai bentuk sedekah kolektif untuk pembangunan nagari.

Belanja Operasional

Pengeluaran untuk menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Beneficiaries (Penerima Manfaat)

Kelompok masyarakat yang mendapatkan dampak dari program pembangunan.

Bilal

Petugas yang mengumandangkan adzan.

Block Grant

Dana bantuan dari pemerintah yang diberikan secara langsung kepada organisasi untuk dikelola sesuai kebutuhan program.

Bottom-Up Approach

Pendekatan pembangunan dari masyarakat ke pemerintah.

Bundo Kanduang

Kelompok perempuan adat Minangkabau yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya, keluarga, dan kehidupan sosial.

Capacity Building (Peningkatan Kapasitas)

Proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya dan pembangunan.

Catalyst (katalisator)

Pihak yang menjembatani dan mempercepat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak lain.

CBD (Community Based Development)

Pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Civil Society (Masyarakat Madani)

Masyarakat beradab yang mandiri, demokratis, menjunjung hukum, serta mampu menyeimbangkan kebebasan individu dan stabilitas sosial.

Coalition Building (Pembangunan Koalisi)

Proses membentuk kerja sama antara berbagai organisasi dan individu untuk menangani isu bersama atau kebutuhan komunitas.

Collapse (kegagalan program)

Kondisi berhentinya program karena ketergantungan sumber daya, terutama dana.

Community Based Development (CBD)

Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan keterlibatan lokal dalam seluruh proses.

Community development (pengembangan masyarakat)

Proses kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi aktif dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Community economic development

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi berbasis lokal.

Community Organizing (Pengorganisasian Masyarakat)

Proses menggerakkan masyarakat untuk mengenali masalah, membangun kekuatan kolektif, dan bertindak bersama.

Community ownership (kepemilikan komunitas)

Kondisi ketika masyarakat memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap program yang dijalankan.

Community-based approach (pendekatan berbasis komunitas)

Pendekatan yang menempatkan komunitas sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan program.

Compatibility (Kompatibilitas)

Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, norma, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat penerima.

Complexity (Kompleksitas)

Tingkat kesulitan suatu inovasi untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat.

Conflict Social (Konflik Sosial)

Pertentangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Da'i

Individu yang melakukan aktivitas dakwah untuk mengajak masyarakat kepada ajaran Islam.

Dakwah bil lisan

Penyampaian ajaran Islam melalui komunikasi verbal atau lisan.

Dakwah

Upaya sistematis untuk mengajak, membina, dan mengarahkan masyarakat agar hidup sesuai ajaran Islam, mencakup perubahan sosial.

Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)

Dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan ke nagari untuk membiayai operasional dan pembangunan.

Dana sosial

Dana kolektif berbasis kesepakatan adat yang digunakan untuk kegiatan sosial, bantuan bencana, dan kebutuhan komunal masyarakat.

Delegated Funding

Skema pendanaan di mana pengelolaan dana didelegasikan kepada lembaga atau organisasi tertentu.

Demokrasi partisipatif

Sistem yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Desentralisasi partisipatif

Penyebaran kewenangan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

Diferensiasi Sosial

Perbedaan peran dan status dalam masyarakat.

Direktif (pendekatan instruktif)

Pendekatan yang menempatkan fasilitator atau pemerintah sebagai penentu utama program.

Discrimination (diskriminasi)

Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu.

DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)

Dokumen resmi pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar kegiatan pembiayaan program.

Dubalang

Pembantu penghulu dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam struktur adat Minangkabau.

Empowerment (pemberdayaan)

Proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mandiri dan berdaya.

Engagement

Tahap awal keterlibatan antara fasilitator dan masyarakat untuk membangun hubungan dan kepercayaan.

Evaluasi pembangunan

Proses penilaian terhadap hasil dan dampak pembangunan.

Expressed needs

Kebutuhan yang secara nyata diungkapkan oleh masyarakat.

External expertise (keahlian pihak luar)

Keterlibatan tenaga ahli dari luar komunitas untuk membantu proses pengembangan.

Falsafah Minangkabau

Nilai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.

Felt needs

Kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan pengalaman langsung.

Formalitas

Kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan substansi.

Garis Kemiskinan

Batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Genealogis

Berkaitan dengan hubungan keturunan atau asal-usul keluarga.

Gotong royong

Kerja bersama secara sukarela untuk mencapai tujuan kolektif dalam masyarakat.

Great individuals theory

Teori yang menyatakan perubahan terjadi karena tokoh besar.

Hak Ulayat

Hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bersama.

Harta pusaka

Aset kolektif milik suku yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sumber ekonomi bersama.

Hibah Administratif

Dana bantuan dengan ketentuan penggunaan yang lebih terikat pada aturan administratif.

Hibah Blok

Bantuan dana dari pemerintah yang penggunaannya relatif fleksibel sesuai kebutuhan daerah.

Hijrah (dalam konteks sosial)

Perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai nilai Islam.

Human Communication

Komunikasi antar individu dalam konteks sosial.

Human rights (hak asasi manusia)

Hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi.

IACD (International Association for Community Development)

Organisasi internasional yang menetapkan standar praktik pengembangan masyarakat.

Imanensi

Proses penerapan nilai-nilai Islam dalam realitas sosial kehidupan masyarakat.

Implementasi

Tahap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Inclusive (inklusif)

Prinsip yang memastikan semua kelompok masyarakat terlibat tanpa pengecualian.

Inclusiveness (Inklusivitas)

Keterbukaan pembangunan yang melibatkan semua kelompok tanpa diskriminasi.

Indikator cakupan (coverage)

Luas jangkauan program terhadap kelompok sasaran.

Indikator dampak (impact)

Ukuran untuk menilai perubahan jangka panjang akibat suatu program.

Indikator efisiensi

Ukuran perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.

Indikator keterjangkauan (accessibility)

Kemudahan masyarakat dalam mengakses program atau layanan.

Indikator ketersediaan (availability)

Ketersediaan sumber daya dan layanan dalam program.

Indikator kualitas

Ukuran mutu dari pelaksanaan dan hasil program.

Indikator pemanfaatan (utilization)

Tingkat penggunaan program oleh masyarakat sasaran.

Indikator relevansi

Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Infrastructure (Infrastruktur Sosial)

Jaringan hubungan, sistem, dan mekanisme dalam masyarakat yang mendukung aksi kolektif dan pemecahan masalah.

Infrastruktur

Sarana dan prasarana fisik yang mendukung aktivitas masyarakat.

Inklusif

Melibatkan semua kelompok tanpa diskriminasi.

Inklusif

Melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi dalam proses pembangunan.

Inovasi

Pembaruan yang memberi nilai tambah.

Inovasi

Proses atau hasil pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki sesuatu yang memberi nilai tambah.

Institusi masjid

Lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pembinaan sosial.

Institusi Sosial

Struktur sosial yang mengatur hubungan dan perilaku dalam masyarakat.

Institusi Sosial

Struktur yang mengatur perilaku masyarakat.

Instrumen mobilisasi partisipasi

Alat atau mekanisme yang digunakan untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Integrasi sosial

Ikatan kuat antarindividu dalam komunitas berdasarkan kekerabatan atau nilai bersama.

Integrated Development (Pembangunan Terpadu)

Pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Integritas organisasional

Kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi dan aturan secara konsisten.

Interaksi Sosial

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam komunikasi dan kegiatan.

Intervensi Pemerintah

Tindakan campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan tanpa melibatkan masyarakat secara optimal.

Intervensi Sosial

Tindakan terencana untuk membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan masalahnya.

Intervensi Sosial

Tindakan terencana untuk membantu masyarakat.

Intimidasi

Tekanan atau ancaman terhadap individu atau kelompok.

Irok bawang

Tempat pengeringan dan penyimpanan bawang hasil panen yang juga difungsikan sebagai wadah sumbangan hasil pertanian untuk pembangunan.

Islamic Community Development (Pengembangan Masyarakat Islam)

Upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Istiqomah

Konsistensi dalam menjalankan kegiatan secara berkelanjutan.

Jamaah

Kelompok masyarakat yang terorganisir dalam ikatan keagamaan.

Jejaring sosial (social network)

Hubungan antarindividu atau kelompok yang mendukung kerja sama dan pertukaran sumber daya.

Jorong

Satuan wilayah administratif terkecil dalam nagari di Sumatera Barat, setara dusun.

Kapalo Banda

Wilayah hulu sumber air yang menjadi pusat irigasi dan kebutuhan air masyarakat.

Kapasitas manajerial

Kemampuan dalam mengelola organisasi, sumber daya, dan proses pembangunan secara efektif.

Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia)

Kemampuan individu atau aparatur dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjalankan tugas pembangunan secara efektif.

Kapuak padi

Lumbung tradisional untuk menyimpan sebagian hasil panen padi yang disumbangkan masyarakat bagi kepentingan nagari.

Katalisator Pembangunan

Pihak atau lembaga yang mempercepat proses sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Kaum

Kelompok kekerabatan dalam satu suku berdasarkan garis keturunan ibu.

Keadilan sosial

Kondisi distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dalam masyarakat.

Kearifan lokal (local wisdom)

Nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat lokal dan digunakan sebagai pedoman hidup.

Keberlanjutan (sustainability)

Kemampuan suatu sistem untuk terus berjalan dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya.

Kebutuhan Jangka Panjang

Kebutuhan strategis yang berdampak pada kesejahteraan berkelanjutan.

Kelembagaan sosial

Sistem norma, nilai, dan peran sosial yang mengatur perilaku masyarakat.

Kelompok Kepentingan

Kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Keluarga besar

Keluarga yang mencakup beberapa generasi atau kerabat luas seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu yang hidup bersama atau berinteraksi intens.

Keluarga inti

Unit keluarga kecil yang terdiri dari orang tua dan anak, dengan fungsi ekonomi, pengasuhan, dan sosial yang mandiri.

Kemandirian (self-reliance)

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa ketergantungan eksternal.

Kembali ke Surau

Program revitalisasi nilai agama dan adat melalui penguatan fungsi surau sebagai pusat pendidikan dan pembinaan sosial.

Kenagarian

Satuan wilayah adat dan administratif di Minangkabau yang setara dengan desa.

Kepala Jorong

Pemimpin wilayah jorong yang bertugas mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan masyarakat di tingkat lokal.

Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Lembaga adat tertinggi di nagari yang berfungsi mengambil keputusan terkait adat dan masyarakat.

Kerja Kolektif

Upaya bersama yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kesadaran Kritis

Kemampuan masyarakat memahami kondisi sosialnya dan bertindak untuk perubahan.

Kesetaraan gender

Persamaan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Keswadayaan

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa ketergantungan eksternal.

Keteladanan

Perilaku yang menjadi contoh dalam pembentukan karakter, nilai, dan kebiasaan individu.

Ketergantungan Anggaran

Kondisi ketika pembangunan sangat bergantung pada dana dari pihak luar.

Ketergantungan Fiskal

Kondisi daerah yang sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Khalifatullah

Manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola kehidupan.

Koentjaraningrat (konsep)

Pandangan bahwa pranata sosial adalah sistem tata kelakuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Khatib

Penyampai khutbah dalam shalat Jumat.

Kognitariat

Kelompok tenaga kerja yang mengandalkan kemampuan intelektual dan kognitif dalam bekerja.

Kohesi sosial

Tingkat keterikatan dan solidaritas antaranggota masyarakat dalam menjaga kesatuan sosial.

Komunikasi sosial

Proses interaksi komunikasi dalam masyarakat yang membentuk hubungan sosial.

Konfirmatif

Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pemberi persetujuan, bukan pengambil keputusan.

Konflik Sosial

Ketegangan atau pertentangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Kontraktor

Pihak atau perusahaan yang melaksanakan proyek pembangunan berdasarkan kontrak kerja.

Kontrol Sosial Formal

Pengaturan perilaku masyarakat melalui aturan resmi.

Kontrol Sumber Daya

Kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.

Koordinasi Antar Stakeholder

Kerja sama antara pihak-pihak terkait dalam pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaksana proyek.

Koroang kampung

Unit wilayah kecil dalam struktur nagari berbasis kesukuan.

Kualitas Hidup Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Legalitas Administratif

Kesesuaian kegiatan pembangunan dengan aturan hukum dan prosedur resmi.

Legitimasi normatif

Pengakuan terhadap suatu sistem atau tindakan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Liberasi (pembebasan)

Upaya melepaskan masyarakat dari struktur yang menindas dan tidak adil.

Linkage (pertalian)

Hubungan antara komunitas dengan pihak luar melalui jaringan sosial.

Local Government Policies

Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Local Resources Based Development

Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya lokal.

Locality Development (Pengembangan Lokalitas)

Proses kolaboratif seluruh elemen masyarakat untuk membangun kapasitas internal, menyelesaikan masalah, dan memenuhi kebutuhan secara mandiri melalui partisipasi aktif.

Lokalitas

Wilayah sosial yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi masyarakat.

Mad'u

Objek atau sasaran dakwah.

Mainstream

Arus utama pemikiran dalam masyarakat.

Malin

Tokoh adat yang bertugas dalam bidang keagamaan dalam struktur suku.

Mamak kepala kaum

Pemimpin dalam kelompok suku yang bertanggung jawab mengatur urusan adat dan anggota kaum.

Mamak Rumah

Tokoh dalam keluarga besar yang mengatur urusan rumah tangga adat.

Manajemen Pembangunan

Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Manti

Pembantu penghulu dalam administrasi adat.

Masak Samalam

Istilah lokal yang berarti perencanaan yang dibuat secara terburu-buru tanpa kajian matang.

Mass Communication

Komunikasi melalui media massa kepada khalayak luas.

Masyarakat Hukum Adat

Kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan aturan adat dan memiliki ikatan wilayah serta keturunan.

Masyarakat madani

Masyarakat yang mandiri, beradab, dan berkeadilan.

Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik melalui garis ibu.

Media Informasi

Sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti papan pengumuman atau plang proyek.

Merantau

Tradisi pergi ke luar daerah untuk mencari pengalaman dan ekonomi, lalu kembali membangun kampung.

Modal sosial (social capital)

Jaringan, kepercayaan, dan norma sosial yang mendukung kerja sama dalam masyarakat.

Model pembangunan adaptif

Pendekatan pembangunan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perubahan zaman.

Model Pengembangan Masyarakat

Kerangka konseptual untuk merancang perubahan sosial melalui pendekatan tertentu seperti partisipatif, teknokratis, atau aksi sosial.

Modernisasi

Perubahan menuju sistem kehidupan modern.

Monitoring (pemantauan)

Proses pengawasan terhadap jalannya program secara berkala.

Monomorphic leadership

Kepemimpinan yang terbatas pada satu bidang, biasanya hanya pada urusan adat tanpa fungsi strategis lain.

Mushalla/Surau

Tempat ibadah dalam skala kecil di masyarakat Muslim, selain masjid.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Forum resmi untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Mustahik

Orang yang berhak menerima zakat.

Musyawarah

Pengambilan keputusan melalui diskusi bersama.

Muzakki

Orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Nagari

Kesatuan masyarakat adat di Minangkabau yang memiliki sistem sosial, adat, dan pemerintahan sendiri.

Nazhir

Pengelola harta wakaf.

Ninik Mamak

Pemimpin adat dalam suku Minangkabau yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan pembinaan anggota suku.

Non-Directive Approach

Pendekatan yang memberi ruang masyarakat menentukan solusi sendiri.

Non-profit oriented

Kegiatan yang tidak berorientasi keuntungan, tetapi pada manfaat sosial.

Non-Violence (Tanpa Kekerasan)

Pendekatan pembangunan yang mengedepankan dialog dan konsensus tanpa konflik destruktif.

Normative needs

Kebutuhan yang ditentukan berdasarkan standar atau norma tertentu.

Objektif

Berdasarkan fakta dan data, bukan opini atau kepentingan pribadi.

Observability (Kemudahan diamati)

Tingkat kemudahan hasil inovasi untuk dilihat atau diamati oleh masyarakat.

Organizational integrity

Kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi secara efektif dan konsisten.

Otonomi Daerah

Kewenangan daerah mengatur urusannya sendiri.

Otoritas sosial-budaya

Kewenangan yang diakui masyarakat dalam mengatur norma, nilai, dan hubungan sosial.

Pagang-gadai

Sistem gadai adat atas harta tertentu dalam kondisi darurat dengan persetujuan seluruh kaum.

Pagu Anggaran

Jumlah dana yang telah ditetapkan untuk suatu program.

Pamong desa

Aparatur pemerintah formal dalam sistem desa modern.

Paralel historis

Kesesuaian atau kemiripan antara praktik masa kini dengan peristiwa sejarah.

Participatory approach (pendekatan partisipatif)

Pendekatan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Paruik

Unit kekerabatan terkecil dalam struktur suku di Minangkabau.

Pasambahan

Pidato adat dalam upacara tradisional Minangkabau.

Pekerja komunitas (community worker)

Individu yang memfasilitasi proses pengembangan masyarakat.

Pekerja Pengembangan Masyarakat

Individu atau pihak yang bertugas merancang, mengelola, dan menjalankan program pembangunan masyarakat.

Pekerja sosial

Profesional yang membantu masyarakat meningkatkan kapasitas dan menyelesaikan masalah sosial.

Pelaksanaan pembangunan

Tahap implementasi program yang telah direncanakan.

Pelestarian aset lokal

Upaya menjaga dan mempertahankan sumber daya lokal agar tetap berfungsi secara berkelanjutan.

Pembangunan Berbasis Proyek

Pembangunan yang bersifat jangka pendek dan fokus pada output fisik tertentu.

Pembangunan berkelanjutan (sustainability)

Pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

Pembangunan Fisik

Pembangunan yang berwujud infrastruktur seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum.

Pembangunan lokal

Model pembangunan yang berfokus pada potensi dan kebutuhan wilayah tertentu.

Pembangunan Mental Spiritual

Program yang bertujuan meningkatkan kualitas nilai, moral, dan keagamaan masyarakat.

Pembangunan Tidak Tepat Sasaran

Kondisi ketika program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pemberdayaan (empowerment)

Proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan mengontrol kehidupannya.

Pemberdayaan Masyarakat

Upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi sendiri.

Pencairan Dana

Proses pengeluaran dana dari anggaran untuk membiayai kegiatan.

Pendapatan Asli Nagari

Sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal nagari.

Pendekatan berbasis hak (rights-based approach)

Pendekatan yang menekankan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pendekatan instruktif

Model pembangunan yang bersifat satu arah, di mana keputusan berasal dari pihak otoritas tanpa keterlibatan aktif masyarakat.

Pendekatan kesejahteraan (welfare approach)

Pendekatan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Pendekatan spiritual-psikososial

Pendekatan yang mengintegrasikan aspek keagamaan, mental, dan sosial dalam pengembangan masyarakat.

Pengambilan keputusan substantif

Proses penentuan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara nyata dan berpengaruh terhadap hasil akhir.

Pengembangan aset

Upaya meningkatkan nilai guna dan manfaat sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Pengembangan masyarakat (community development)

Upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Pengembangan masyarakat Islam (PMI)

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan.

Penghulu (Datuak)

Kepala suku yang memiliki otoritas adat dan memimpin kehidupan sosial serta pengelolaan harta pusaka.

Pengkajian

Proses analisis mendalam terhadap suatu program atau usulan berdasarkan data dan pertimbangan tertentu.

Pengorganisasian masyarakat

Proses membangun struktur dan koordinasi dalam komunitas untuk mencapai tujuan bersama.

People centered development

Paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat, dengan fokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat Nagari

Aparatur pemerintahan di tingkat nagari yang bertugas mengelola administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terarah.

Perencanaan Sosial (Social Planning)

Model pengembangan masyarakat berbasis analisis ahli dan kebijakan (top-down).

Perspektif Ekologi Sosial

Pendekatan yang melihat hubungan antara manusia, lingkungan, dan sistem sosial dalam pembangunan.

Perubahan Perilaku

Perubahan tindakan individu akibat proses belajar, pengalaman, atau pengaruh lingkungan.

Perubahan Sosial

Perubahan struktur dan pola kehidupan masyarakat.

Petunjuk Teknis (Juknis)

Pedoman teknis yang lebih rinci terkait cara pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran.

Petunjuk Umum (Jukum)

Pedoman umum yang mengatur pelaksanaan suatu program atau penggunaan anggaran.

Piagam Madinah

Dokumen kesepakatan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural di Madinah.

Plafon Anggaran

Batas maksimal dana yang dialokasikan untuk suatu kegiatan.

Planned Change (Perubahan Terencana)

Perubahan perilaku yang dilakukan secara sadar dan direncanakan.

Policy Change (Perubahan Kebijakan)

Proses mengubah aturan atau regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Politik Pembangunan

Pengaruh kepentingan politik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

PRA (Participatory Rural Appraisal)

Metode partisipatif untuk menggali informasi dan kondisi masyarakat secara langsung.

Pragmatis

Pendekatan yang berorientasi pada hasil cepat tanpa mempertimbangkan aspek jangka panjang.

Pranata adat

Sistem norma dan aturan berbasis adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Pranata sosial

Sistem nilai, norma, dan peran yang mengatur perilaku masyarakat.

Problematika

Kumpulan masalah kompleks yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan.

Profesionalisme Aparatur

Standar kompetensi dan etika kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Profesionalisme Pelaksana

Kemampuan dan sikap kerja pelaksana pembangunan yang sesuai standar teknis dan etika.

Profit oriented

Kegiatan usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan finansial.

Proletariat

Kelompok pekerja yang mengandalkan tenaga fisik dengan keterampilan kognitif terbatas.

Proposal

Dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan secara rinci, mencakup tujuan, jenis kegiatan, volume, dan anggaran.

Proses dialogis

Interaksi dua arah yang melibatkan komunikasi dan pertukaran gagasan.

Proyek Mangkrak

Pembangunan yang tidak selesai atau tidak dimanfaatkan.

Pusako (Harta Pusaka)

Harta warisan adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak boleh diperjualbelikan.

Pusako tinggi

Harta warisan adat yang tidak boleh diperjualbelikan dan dimiliki secara komunal.

Qadhi

Pemimpin yang bertugas dalam hukum Islam.

Radikal (pendekatan transformasional)

Pendekatan yang bertujuan mengubah struktur sosial yang tidak adil.

Rapat Komisi

Rapat dalam kelompok kecil di BPN berdasarkan bidang tertentu untuk membahas program.

Rapat Paripurna

Rapat pleno seluruh anggota BPN untuk menetapkan dan mengesahkan keputusan.

Realisasi Program

Pelaksanaan nyata dari rencana program yang telah disusun.

Re-assessment

Pengkajian ulang terhadap kondisi masyarakat untuk memastikan akurasi data.

Reciprocity

Hubungan timbal balik dalam bentuk saling membantu atau memberi.

Relative Advantage (Keunggulan Relatif)

Tingkat keuntungan suatu inovasi dibandingkan dengan cara lama menurut persepsi masyarakat.

Rembuk Jorong

Forum musyawarah masyarakat di tingkat jorong untuk membahas pembangunan.

Rembuk Jorong

Musyawarah masyarakat di tingkat jorong untuk membahas pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari

Dokumen perencanaan pembangunan nagari untuk periode 6 tahun.

RKA (Rencana Kerja Anggaran)

Dokumen yang memuat rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan.

RKP (Rencana Kerja Pembangunan)

Dokumen perencanaan tahunan nagari yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan.

Ruislag (tukar guling)

Penukaran aset wakaf sesuai aturan syariah dan hukum.

Rumah Gadang/Rumah Tuo

Rumah adat Minangkabau sebagai pusat kehidupan dan musyawarah kaum.

Sawah Abuan

Lahan pertanian milik bersama dalam suku yang digunakan untuk kepentingan kolektif.

Sedekah jariyah

Amal yang manfaatnya terus mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia.

Seleksi Program

Proses penentuan sasaran dan prioritas program berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.

Self-determination

Kemampuan masyarakat menentukan arah pembangunan sendiri.

Self-directed action

Kemampuan masyarakat untuk bertindak atas inisiatif sendiri.

Self-Help

Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalah sendiri.

Self-Reliance (Kemandirian)

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Sentralisasi

Pemusatan kekuasaan atau keputusan pada satu pihak atau tingkat tertentu.

Sentralistik

Sistem pengambilan keputusan yang terpusat pada pemerintah pusat.

Silat Minang

Seni bela diri tradisional Minangkabau.

Silaturahmi

Hubungan sosial berbasis kepercayaan.

Sinergi

Kerja sama antara masyarakat dan institusi untuk mencapai tujuan bersama.

Sistem Pendukung Masyarakat

Struktur dan mekanisme yang membantu keberhasilan pembangunan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Social Action (Aksi Sosial)

Model perubahan sosial melalui mobilisasi masyarakat untuk melawan ketidakadilan.

Social change (perubahan sosial)

Perubahan struktur dan sistem dalam masyarakat.

Social Justice (Keadilan Sosial)

Distribusi hak dan kewajiban secara adil.

Social movement (gerakan sosial)

Aksi kolektif untuk mendorong perubahan dalam masyarakat.

Social Planning (Perencanaan Sosial)

Pendekatan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah atau ahli secara terpusat, bersifat instruktif, dan berbasis perencanaan teknokratis.

Sosial Ekonomi

Kondisi masyarakat yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi.

Sosialisasi

Proses penyampaian informasi kepada masyarakat agar memahami program, kebijakan, atau kegiatan tertentu.

Stakeholders

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu program pembangunan.

Standar Kualitas Pembangunan

Ukuran teknis yang menentukan baik atau buruknya hasil pembangunan.

Stereotip Sosial

Pandangan atau label negatif yang melekat pada individu atau kelompok tertentu.

Struktur adat Minangkabau

Sistem sosial berbasis suku, kekerabatan, dan kepemimpinan adat yang mengatur kehidupan masyarakat.

Struktur Sosial

Pola hubungan dalam masyarakat.

Struktur suku Quraisy

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Arab yang menjadi basis awal dakwah Islam.

Subsidi Biaya Administrasi

Bantuan pemerintah untuk menutup biaya operasional administrasi program.

Suku (Minangkabau)

Kelompok kekerabatan berbasis garis keturunan ibu (matrilineal) yang berfungsi sebagai unit sosial, identitas, dan pranata adat.

Sumando

Laki-laki yang menikah dengan perempuan dalam suatu suku dan menjadi bagian dari keluarga istrinya.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan individu yang terlibat dalam proses pembangunan.

Sunnatullah

Hukum ketetapan Allah yang mengatur perubahan dalam kehidupan.

Surau Kaum

Surau yang dibangun dan dimiliki oleh satu kaum dalam suku.

Surau

Bangunan ibadah sekaligus pusat pendidikan, sosial, dan pembinaan pemuda di Minangkabau.

Sustainability (Keberlanjutan)

Kemampuan program bertahan jangka panjang.

Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan jangka panjang.

Swadaya Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menggunakan sumber daya sendiri.

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

Analisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu program.

SWOT Analysis

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Syarak mangato, adat mamakai

Ungkapan adat yang berarti ajaran agama menjadi pedoman, dan adat menjadi pelaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Systems Advocacy (Advokasi Sistem)

Upaya mempengaruhi sistem sosial atau kelembagaan agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ta'awun

Kerja sama atau tolong-menolong dalam kebaikan.

Taghayyur (Perubahan)

Perubahan dalam kondisi sosial masyarakat.

Taghyirul ijtima'iyah

Rekayasa sosial untuk perubahan masyarakat.

Tahap Pemberdayaan

Tahap ketika masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya.

Tahawwul (Transformasi)

Perubahan mendasar menuju kondisi yang lebih baik sesuai nilai Islam.

Takwin

Tahap awal pengembangan masyarakat Islam yang berfokus pada pembentukan akidah, ukhuwah, dan kesadaran sosial.

Tali Tigo Sapilin

Sistem kepemimpinan Minangkabau yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai.

Tanah ulayat

Tanah milik bersama suatu suku yang dikelola untuk kepentingan anggota suku.

Tanah wakaf

Tanah yang disumbangkan untuk kepentingan umum dan keagamaan sesuai prinsip Islam.

Tanzim

Tahap pengorganisasian masyarakat Islam melalui sistem sosial, institusi, dan aturan yang terstruktur.

Taudi' (atau Tawdhi')

Tahap kemandirian masyarakat, ditandai dengan kemampuan mengelola kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri.

Tender

Proses seleksi terbuka untuk menentukan pihak pelaksana proyek pembangunan.

Terminasi

Tahap pengakhiran hubungan formal antara fasilitator dan masyarakat.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim yang dibentuk untuk menjalankan program pembangunan secara teknis di lapangan.

Tim Sebelas

Tim khusus di nagari yang berperan menghimpun aspirasi masyarakat, merumuskan usulan program, dan menjembatani ke pemerintah nagari.

Tingkat Kesadaran

Tahap awal dimana masyarakat memahami hak dan potensinya.

Top-down

Pendekatan pembangunan yang berasal dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara aktif.

Transformasi sosial

Perubahan mendasar dalam struktur dan sistem sosial masyarakat.

Transparansi Pemerintah

Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program pembangunan.

Transparansi

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan program.

Trialability (Kemampuan diuji coba)

Kemudahan suatu inovasi untuk diuji sebelum diadopsi secara luas.

Trust (Kepercayaan)

Dasar hubungan sosial dalam masyarakat.

Tungganai

Laki-laki tertua dalam rumah gadang yang memimpin keluarga kecil.

Tungku tigo sajarangan

Konsep kepemimpinan Minangkabau yang terdiri dari tiga unsur: ninik mamak, alim ulama, dan cadik pandai.

Ukhuwah Islamiyah

Persaudaraan dalam Islam yang menjadi dasar solidaritas sosial.

Ulayat

Wilayah kekuasaan adat suatu suku yang digunakan untuk kehidupan bersama.

Ummah

Komunitas umat Islam secara luas.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Dasar hukum nasional yang mengatur hak atas tanah, termasuk pengakuan hak ulayat.

Unit Usaha Produktif

Kegiatan ekonomi yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat atau lembaga.

Unit usaha produktif

Kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat atau organisasi.

Urang Bagak Nagari

Individu berpengaruh di tingkat lokal yang menguasai atau mengendalikan proyek pembangunan.

Urang Jinih Nan Ampek

Empat unsur kepemimpinan agama di masjid: qadhi, imam, khatib, dan bilal.

Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Usrah

Unit keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat Islam.

Value (Nilai)

Prinsip atau standar yang menjadi dasar perilaku dan keputusan dalam masyarakat.

Variabel Model Rothman

Parameter untuk membedakan tiga model pengembangan masyarakat: tujuan, struktur kekuasaan, strategi, dan peran aktor.

Vision (Visi Bersama)

Gambaran masa depan yang disepakati oleh masyarakat sebagai tujuan kolektif.

Wakaf ahli

Wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, seperti keluarga atau suku.

Wakaf khairi

Wakaf untuk kepentingan umum masyarakat luas.

Wakif

Pihak yang mewakafkan harta.

INDEKS

Adat basandi syarak, 84
Alam Takambang Jadi Guru, 129, 158, 185
Balambai Ari, 75, 76, 186
Bareh Pacik, 74, 75, 76, 186
Community Based Development, 28, 187, 188
Dana Alokasi Umum Nagari, 130, 189
Dubalang, 189
Hak Ulayat, 68, 69, 190
Harta pusaka, 64, 134, 190
Kearifan lokal, 49, 50, 51, 52, 115, 126, 149, 150, 195
Kenagarian, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 84, 86, 87, 139, 169, 195
Kerapatan Adat Nagari, 59, 121, 161, 196
Malin, 198
Mamak kepala kaum, 76, 77, 82, 198
Masjid, iii, 77, 78, 84, 85, 110, 126, 133, 135
Minangkabau, 19, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 109, 110, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 145, 146, 148, 150, 157, 158, 160, 161, 166, 167, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213
Modal sosial, 25, 51, 142, 160, 161, 199
Model Pengembangan Masyarakat, ii, iii, v, 88, 91, 96, 105, 166, 183, 199

Nagari, i, ii, 65, 67, 74, 75, 85, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 182, 185, 186, 200, 203, 204, 207, 213

Ninik Mamak, 50, 58, 60, 73, 74, 77, 78, 84, 86, 110, 133, 137, 139, 140, 142, 148, 153, 154, 156, 161, 166, 168, 170, 172, 200

Otonomi Daerah, 67, 201

Pemberdayaan, iii, iv, v, 13, 33, 114, 117, 163, 168, 176, 178, 180, 202, 203, 211

Pengembangan masyarakat Islam, i, 31, 32, 43, 92, 127, 163, 166, 174, 203

Penghulu, 55, 56, 59, 60, 134, 204

Pusako tinggi, 206

Rumah Gadang, ii, iii, 66, 78, 145, 207

Solidaritas, ii, iv, 64, 72, 85, 149, 185

Surau, ii, iii, 51, 63, 66, 77, 78, 79, 80, 112, 117, 127, 134, 138, 145, 146, 147, 161, 176, 182, 195, 200, 210

BIODATA PENULIS



Dr. Mistarija, M.A., lahir di Limau Purut, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada tahun 1983. Penulis merupakan akademisi dan dosen pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang sejak tahun 2015. Aktivitas akademiknya berfokus pada pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan sosial, dakwah transformatif, serta penguatan kelembagaan masyarakat berbasis nilai budaya dan keislaman.

Pendidikan magister diselesaikan pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2011 dengan Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Selanjutnya, pendidikan doktor diselesaikan pada Program Doktor Pengkajian Islam konsentrasi Dakwah dan Komunikasi di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2023. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk arah pemikiran dan konsistensi keilmuan penulis dalam mengembangkan kajian dakwah yang berorientasi pada transformasi sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan modal sosial berbasis kearifan lokal.

Sebagai akademisi, penulis aktif melakukan penelitian dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan komunitas, modal sosial, partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, dan pembangunan berbasis budaya. Berbagai karya ilmiah penulis telah dipublikasikan pada jurnal nasional dan prosiding ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dakwah sosial, dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal. Publikasi ilmiah penulis dapat ditelusuri melalui Google Scholar.

Selain kegiatan pendidikan dan penelitian, penulis juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan. Kegiatan tersebut diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi lokal, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai sosial keislaman dalam kehidupan masyarakat. Bagi penulis, pengembangan masyarakat bukan sekadar proses pembangunan sosial, tetapi juga ikhtiar membangun masyarakat yang mandiri, berkeadaban, dan memiliki ketahanan budaya di tengah perubahan zaman.

Melalui berbagai aktivitas akademik dan sosial tersebut, penulis terus berupaya mengembangkan model pengembangan masyarakat Islam yang kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Buku ini menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran penulis dalam memperkuat integrasi antara nilai Islam, kearifan lokal, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Email: mistarija@uinib.ac.id

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus refleksi sosial terhadap dinamika pembangunan masyarakat yang sering kali belum sepenuhnya berpijak pada nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, masyarakat membutuhkan model pengembangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga mampu menjaga identitas sosial, nilai budaya, dan ketahanan moral masyarakat.

Pengembangan masyarakat Islam dalam buku ini dipahami sebagai proses pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya partisipasi, penguatan kelembagaan lokal, solidaritas sosial, serta integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya masyarakat. Kearifan lokal diposisikan bukan sekadar warisan budaya, tetapi sebagai modal sosial yang hidup dan terus berkembang dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan konsep dasar pengembangan masyarakat Islam, model dan pendekatan pemberdayaan, struktur sosial masyarakat lokal, peran kelembagaan adat dan keagamaan, hingga strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Berbagai pembahasan tersebut diarahkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan memahami karakter sosial, budaya, dan nilai kehidupan masyarakat setempat.

Buku ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, kepedulian sosial, kepemimpinan adat, dan semangat kolektivitas merupakan kekuatan penting dalam proses pembangunan masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam, maka akan lahir model pengembangan masyarakat yang tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas moral, spiritual, dan sosial masyarakat secara menyeluruh.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

 @penerbitbukujogja

 @penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-468-6

